

**PELAKSANAAN PENDIDIKAN POLITIK OLEH PARTAI DEMOKRAT
DI DAERAH PEMILIHAN IV KABUPATEN TEMANGGUNG
BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008
TENTANG PARTAI POLITIK**

SKRIPSI



Oleh :

GESIT TRI SUSILA

No. Mahasiswa : 02410180

Program Studi : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2012

MOTTO

Siapa yang melalui jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya kesurga. Dan para malaikat selalu meletakkan sayapnya menaungi para pelajar karena senang dengan perbuatan mereka.

(Al Hadist).

Sebuah prestasi tanpa ditambah kepribadian dan sikap mental yang positif akan rapuh dan mudah runtuh.

Kegagalan bukan berarti akhir dari pekerjaan, tetapi merupakan awal dari keberhasilan
(Bartolomeus Diaz).

Jadikanlah hari hari ini lebih baik dari pada hari kemarin, dan jadikanlah hari esok lebih baik dari hari ini.

PERSEMBAHAN

Tulisan skripsi ini dengan segala kekurangan dan kelebihan saya persembahkan untuk:

ALLAH SWT yang selalu melimpahkan berkah, rahmad dan didhonya.

Ayah (Mutono), Ibu (Daryati), Kakak (Setyo Dwe Sridana) dan Adik (Tatak Catur Prasetya) yang selalu memberikan do'a restu, dukungan serta kasih sayang yang tiada henti kepada saya.

Bapak Dr. H. Syahwidad Syahrudin Fahmi Marbun, SH., dan Bapak M Sodiq selaku dosen pendamping akademik dan wakil dosen pembimbing akademik serta Ibu Dr. Hj. Ni'matul Huda, SH., MH. Selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan nasehat, dukungan dan motivasi kepada saya.

Sahabat dan teman-teman (Andi Kuriawan, Ahmad Nurudin, Dimas Widya, Henry Rahmawan dan Dita Sumantri) yang selalu memberikan semangat serta dukungan hingga terselesaikannyaskripsi ini.

KATA PENGANTAR

Penulis pertama-tama mengucapkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan rahmat, kekuatan dan ketabahan pada penulis untuk menyelesaikan tugas-tugas kuliah dalam pemenuhan syarat mencapai gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Skripsi ini terselesaikan atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, baik berupa pikiran, tenaga ataupun materi sejak penulis memulai kuliah hingga penulisan skripsi ini.

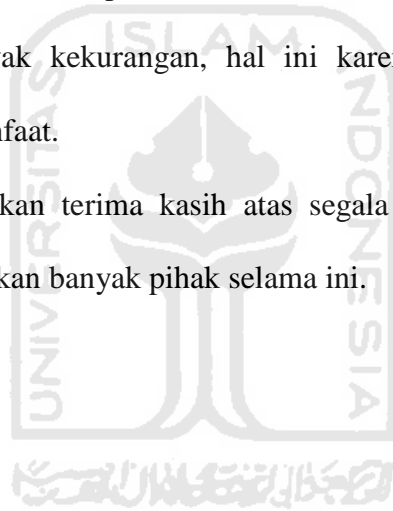
Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Yang terhormat, Bapak Dr. H. Rusli Muhammad, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Yang terhormat Ibu Karimatul Ummah, SH., MH., selaku Ketua Jurusan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
3. Yang terhormat, Bapak Dr. H. Syahwidad Syahrudin Fahmi Marbun, SH., MH., selaku dosen pembimbing akademik dan Bapak M Sodik, selaku pendamping dosen pembimbing akademik yang telah memberikan saran dan motivasi selama ini.
4. Yang terhormat, Ibu Dr. Hj. Ni'matul Huda, SH., MH., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan dan masukan selama ini.
5. Yang terhormat, Bapak Sujarwo dan Bapak Adi Setyaka selaku ketua dan sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Temanggung.

7. Yang saya cintai, Ayah (Mutono), Ibu (Daryati), Kakak (Setyo Dwee Sridana) dan Adik (Tatak Catur Prasetya) yang selalu memberikan do'a, dukungan serta kasih sayang selama ini.
6. Seluruh sahabat dan teman-teman (Andi Kuriawan, Ahmad Nurudin, Dimas Widya, Henry Rahmawan dan Dita Sumantri), yang selama ini selalu memberi semangat dan dukungan baik langsung maupun tidak langsung.

Dengan kerendahan hati, penulis mohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan, hal ini karena keterbatasan penulis. Semoga tulisan ini bermanfaat.

Penulis mengucapkan terima kasih atas segala bantuan, dukungan serta motivasi yang telah diberikan banyak pihak selama ini.



Yogyakarta, 30 Januari 2012

Penulis

Gesit Tri Susila

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAKSI.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaka.....	7
E. Metode Penelitian.....	14
1. Obyek Penelitian.....	14
2. Subyek Penelitian.....	15
3. Sumber Data Data.....	15
4. Tehnik Pengumpulan Data.....	15
5. Pendekatan.....	15
6. Analisis Data.....	16
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG DEMOKRASI, PARTAI POLITIK DAN PENDIDIKAN POLITIK.....	17
A. Demokrasi	17
B. Pengertian Partai Politik.....	29
C. Perkembangan Partai Politik di Indonesia.....	35
1. Jaman Penjajahan Belanda.....	35
2. Jaman Penjajahan Jepang.....	35

3. Jaman Kemerdekaan.....	36
4. Jaman Reformasi.....	36
D. Fungsi Partai Politik	46
E. Pengertian Pendidikan Politik	48
F. Tujuan Pendidikan Politik.....	52
G. Hal-hal Yang Berkaitan Dengan Pendidikan Politik.....	54
H. Pendidikan Politik di Indonesia.....	59
BAB III. PERANAN PARTAI DEMOKRAT DALAM PENDIDIKAN POLITIK DI DAERAH PEMILIHAN IV KABUPATEN TEMANGGUNG.....	64
A. Daerah Pemilihan IV Kabupaten Temanggung.....	64
B. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Temanggung.....	65
C. Peranan Partai Demokrat dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik di Daerah Pemilihan IV Kabupaten Temanggung.....	71
D. Usaha-Usaha Yang Telah Dilakukan Oleh DPC Partai Demokrat di Daerah Pemilihan IV Kabupaten Temanggung Dalam Rangka Pelaksanaan Pendidikan Politik.....	76
E. Hambatan DPC Partai Demokrat dalam Melaksanakan Pendidkan Politik di Daerah Pemilihan IV Kabupaten Temanggung.....	78
BAB IV.PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Skripsi ini mengenai **PELAKSANAAN PENDIDIKAN POLITIK OLEH PARTAI DEMOKRAT DI DAERAH PEMILIHAN IV KABUPATEN TEMANGGUNG BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK**. Permasalahan dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimana pelaksanaan pendidikan politik oleh Partai Demokrat di Daerah Pemilihan IV Kabupaten Temanggung berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. (2) Apa yang menjadi kendala Partai Demokrat dalam melaksanakan pendidikan politik di Daerah Pemilihan IV Kabupaten Temanggung berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis politik, yaitu meneliti obyek penelitian dari aspek aturan hukum dan dalam praktek politik. Subyek penelitian pada skripsi ini adalah pengurus cabang dan anak cabang Partai Demokrat Kabupaten Temanggung. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, yaitu mengadakan tanya-jawab secara lisan dengan responden tentang hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan politik dan studi kepustakaan, yaitu dilakukan dengan cara menelaah buku-buku, perundang-undangan, karya ilmiah maupun tulisan-tulisan ilmiah. Data yang diperoleh dari penelitian baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, kemudian dianalisa dengan menggunakan metode diskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh di lapangan maupun di perpustakaan disusun secara sistematis setelah diseleksi berdasarkan permasalahan dan dilihat kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya disimpulkan sehingga diperoleh jawaban permasalahan tentang peranan partai politik terhadap pendidikan politik masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Sesuai dengan fungsinya, Partai Demokrat memiliki peran yang sangat besar dalam pelaksanaan pendidikan politik bagi seluruh warga masyarakat di Daerah Pemilihan IV Kabupaten Temanggung. (2) Dimasukkannya program pendidikan politik dalam program DPC Partai Demokrat merupakan salah satu wujud usaha yang dilakukan Partai Demokrat untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat di Daerah Pemilihan IV Kabupaten Temanggung. (3) Partai Demokrat dalam meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan sesuai landasan ideologi Pancasila, dan landasan konsitusional UUD 1945.

**PELAKSANAAN PENDIDIKAN POLITIK OLEH PARTAI
DEMOKRAT DI DAERAH PEMILIHAN IV KABUPATEN
TEMANGGUNG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (STRATA-1) Pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



Oleh :

GESIT TRI SUSILA

No. Mahasiswa : 02.410.180
Program Studi : Ilmu Hukum

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
YOGYAKARTA
2012**



SKRIPSI

**PELAKSANAAN PENDIDIKAN POLITIK OLEH PARTAI
DEMOKRAT DI DAERAH PEMILIHAN IV KABUPATEN
TEMANGGUNG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk diajukan
ke muka Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran
pada tanggal 16 Februari 2012



Yogyakarta, 1 Februari 2012
Dosen Pembimbing Skripsi

(Dr. Ni'matul Huda, SH., M.Hum.)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PENDIDIKAN POLITIK OLEH PARTAI
DEMOKRAT DI DAERAH PEMILIHAN IV KABUPATEN
TEMANGGUNG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK**

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran
pada tanggal **16 Februari 2012** dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 16 Februari 2012

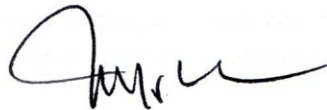
Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : Dr. Ni'matul Huda, SH., M.Hum.
2. Anggota : Dr. Drs. Muntoha, SH., M.Ag.
3. Anggota : Drs. Agus Triyanta, MA. MH. Ph.D.



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Fakultas Hukum
Dekan



Dr. H. Rusli Muhammad, SH., M.H.
NIP. 195406121984031001

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrohman nirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : GESIT TRI SUSILA

No. Mhs : 02.410.180

adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi/Legal Memorandum/Studi Kasus Hukum dengan judul :

PELAKSANAAN PENDIDIKAN POLITIK OLEH PARTAI DEMOKRAT DI DAERAH

PEMILIHAN IV KABUPATEN TEMANGGUNG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG

NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan '*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*';
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 30 JANUARI 2012

Yang membuat Pernyataan



GESIT TRI SUSILA

c. Nama Terang Ybs.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fundamental pembangunan ekonomi yang rapuh, penyelenggaraan negara yang sangat birokratis dan cenderung korup serta tidak demokratis telah menyebabkan krisis moneter dan ekonomi yang nyaris berlanjut dengan krisis moral yang memprihatinkan. Oleh karena itu reformasi disegala bidang perlu dilakukan untuk membangkitkan kembali dan memperteguh kepercayaan diri atas kemampuan serta melakukan penyelamatan, pemulihan, pemantapan dan pengembangan pembangunan.

Salah satu bidang yang memerlukan perhatian adalah bidang politik, khususnya mengenai partai politik. Kehidupan kepartaian di Indonesia telah mengalami pasang surut, pada masa Orde Baru partai politik tidak diberi kesempatan untuk berkembang. Pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan politik yang sebagian besar dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk tidak mengulang pengalaman kepartaian dan pemerintahan parlemen pada dasawarsa 1950-an. Kebijakan Orde Baru tersebut diantaranya adalah perlunya membatasi jumlah partai politik, menjaga stabilitas politik dan pemerintahan supaya kebijakan pemerintah dapat ditegakkan dan mengurangi polarisasi ideologi masyarakat dan sistem kepartaian.

Suatu negara yang akan menerapkan sistem politik modern, harus siap dengan kehadiran lembaga politik modern. Dengan adanya partai politik yang menampung aspirasi warga negara, merupakan suatu identitas yang mampu mendorong partisipasi warga negara untuk turut menentukan siapa yang akan menjadi pimpinan. “Adanya organisasi politik yang berwujud partai-partai dan organisasi massa serta group-group lainnya adalah sesuatu yang tidak boleh ditiadakan dalam kehidupan demokratis”.¹

Partai politik bagi sebagian orang merupakan alat yang ampuh untuk mencapai tujuan politiknya. Hubungan antara partai politik sebagai institusi yang menjadi alat bagi manusia untuk mengendalikan kekuasaan dengan masyarakat sangat erat sekali. Berdirinya partai politik dan perkembangannya selalu mengalami pasang surut, tergantung dengan kebudayaan yang dianut oleh suatu masyarakat.

Melalui partai politik, rakyat dapat mewujudkan haknya untuk menyatakan pendapat tentang arah kehidupan berbangsa dan bernegara. Keragaman pendapat di dalam masyarakat akan melahirkan keinginan untuk membentuk berbagai partai politik sesuai dengan ragam pendapat yang hidup. Partai politik dapat berfungsi untuk mengembangkan kesadaran atas hak dan kewajiban politik rakyat, menyalurkan kepentingan masyarakat dalam pembuatan kebijakan negara serta membina dan mempersiapkan anggotanya untuk mengisi jabatan-jabatan politik sesuai dengan mekanisme demokrasi.

¹ Toto Pandoyo, *Ulasan Terhadap Beberapa Ketentuan UUD 1945*, Liberty, Yogyakarta, 1981, hlm. 51.

Selain hal tersebut, partai politik merupakan salah satu wahana guna menyatakan dukungan dan tuntutan dalam proses politik.

Fenomena yang ada dalam perkembangan kehidupan politik adalah, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui hak dan kewajibannya dalam bidang politik, dan tidak mampu memahami kedudukan pribadinya serta peranan politiknya. Masyarakat pada umumnya hanya dijadikan obyek politik, dan dengan terpaksa harus bersedia menjadi obyek kepentingan negara serta disisi lainnya menjadi obyek kepentingan partai politik.

Masalah pendidikan politik kepada rakyat bukan hanya menjadi tugas pemerintah saja, tetapi partai politik juga memegang peranan yang sangat penting. Pada hakikatnya pendidikan politik merupakan masalah penting yang memerlukan perhatian dan penanganan secara serius, karena menyangkut kepentingan nasional dan demokrasi Pancasila demi kelestarian dan kejayaan bangsa. Tujuan dari pendidikan politik itu sendiri menurut Kartono antara lain adalah:²

1. Membuat rakyat menjadi sadar politik.
2. Membuat rakyat lebih kreatif dalam partisipasi sosial politik di era pembangunan.
3. Bertujuan untuk menggerakkan keterbukaan serta kerjasama yang memberdayakan masyarakat Indonesia yang bercorak majemuk dalam berbagai segi kehidupan.

² Kartono, *Pendidikan Politik Sebagai Bagian Dari Pendidikan Orang Dewasa*, Mandar Madju, Bandung, 1996, hlm. 41.

Rakyat sangat memerlukan pendidikan politik menghadapi pemilu, masalah itu sangat penting dan mendesak karena telah diberlakukannya sistem pemilu baru untuk memilih para wakil rakyat di DPR, DPRD, DPD, Presiden dan Wakil Presiden. Di sisi lain, keadaan riil politik nasional Indonesia kini sedang dilanda masalah serius, yakni menyangkut kemerosotan etika moral. Kepentingan partai atau pribadi telah menguasai kepentingan rakyat, sehingga rakyat yang mewakilkan kedaulatannya kepada partai politik justru dilupakan, akibatnya perubahan politik yang berlangsung semenjak digulirkannya reformasi tahun 1998 silam belum membawa dampak perbaikan kehidupan rakyat. Bahkan ada kesan rakyat diperalat oleh strategi baru yang dikembangkan oleh masing-masing partai bagi kemenangan pemilu.

Tidak ada upaya lain yang bisa dilakukan oleh partai politik dan komponen bangsa lainnya untuk memperbaiki kehidupan masyarakat kecil, kecuali membantu masyarakat agar menjadi lebih berdaya dalam cara pandang hidup politik mereka. Masyarakat memerlukan pendidikan bermutu dalam hidup politik, hal ini berkaitan dengan aspirasinya guna mampu memilih wakil-wakilnya untuk DPR, DPRD, DPD, Presiden dan Wakil Presiden.

Ada perbedaan pemilu tahun 2009 dan pemilu yang sudah berlangsung sebelumnya, yakni dalam sistemnya. Contohnya pemilihan anggota DPR melalui partai dan pribadi calon, dan pemilihan DPD melalui pengajuan oleh masyarakat non partisan. Pemilihan presiden dan wakilnya akan terselenggara secara langsung. Oleh karena itu, rakyat membutuhkan pendamping yang cerdas, agar mampu melakukan pemilihan tepat partai dan tepat orang. Pemilu

bukan pertama-tama soal moral, tetapi lebih pada kejelasan dalam mengembangkan harkat dan otonomi pribadi dalam wawasan nasional. Pendidikan politik diarahkan agar semakin membuat rakyat mampu untuk memilih partai atau orang yang punya komitmen menghargai pluralitas. Partai politik dalam hal ini mempunyai peluang untuk memainkan peran dalam proses pendidikan politik yang menghormati proses demokrasi.

Pendidikan politik menjadi lebih penting bagi masyarakat seiring dengan semakin banyaknya masyarakat yang enggan menggunakan hak pilihnya. Di samping hal tersebut, saat ini sistem pemilihan umum juga berbeda dengan pemilihan yang dilakukan sebelumnya sebelumnya. Khususnya terhadap masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya, hal ini menjadi salah satu tugas dari partai politik untuk ikut memberikan penyadaran/pendidikan kepada masyarakat, bahwa suara mereka sangatlah menentukan masa depan bangsa/daerah. Partai politik sangat diharapkan tidak hanya sekedar berusaha meraih suara sebanyak-banyaknya, akan tetapi pembelajaran kepada masyarakat jangan sampai ditinggalkan.

Dengan mengangkat isu-isu yang menyangkut hajat hidup yang berkembang di masyarakat, partai politik berupaya mencari masa dengan berkampanye disertai janji-janji politis yang belum tentu kebenarannya. Partai politik sering kali melupakan kewajiban mereka terhadap warga masyarakat yang telah membesarkan partai politik itu sendiri. Banyak pertanyaan muncul mengapa hingga saat ini warga masyarakat belum banyak memahami arti penting pendidikan politik yang secara nyata merupakan hak mereka, dimana

hak tersebut akan menjadi bekal dalam menjalankan kehidupannya. Keberhasilan Partai Demokrat di Kabupaten Temanggung pada Pemilihan Umum 2009 membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam, terutama dalam hal sekai mana Partai Demokrat telah melaksanakan pendidikan politik bagi warga masyarakat di Daerah Pemilihan IV Kabupaten Temanggung. Untuk itu, dalam proposal ini penulis akan memberikan uraian dengan judul, "Pelaksanaan Pendidikan Politik Oleh Partai Demokrat Di Daerah Pemilihan IV Kabupaten Temanggung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pendidikan politik oleh Partai Demokrat di Daerah Pemilihan IV Kabupaten Temanggung berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik?
2. Apa yang menjadi kendala Partai Demokrat dalam melaksanakan pendidikan politik di Daerah Pemilihan IV Kabupaten Temanggung berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, penulisan hukum ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pendidikan politik oleh Partai Demokrat di Daerah Pemilihan IV Kabupaten Temanggung.
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Partai Demokrat dalam pelaksanaan pendidikan politik di Daerah Pemilihan IV Kabupaten Temanggung.

D. Tinjauan Pustaka

Demokrasi berasal dari dua kata Yunani, *demos* artinya rakyat dan *kratos* artinya pemerintahan. Jadi, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat untuk rakyat. Ideologi yang ditata dengan memadukan nilai-nilai liberal, pemerintahan berdasarkan hukum, dan berdasarkan sistem Pemilu yang bebas. Adapun prinsip utama yang mendasari ide demokrasi ialah konstitusionalisme, kedaulatan rakyat, aparat yang bertanggungjawab dan pemerintahan yang berdasarkan undang-undang dan asas mayoritas.³

Amien Rais berpendapat demokrasi sebagai sistem politik dan pemerintahan dianggap mempunyai akar sejarah yang panjang sampai ke zaman Yunani Kuno, sehingga tahan banting zaman dan dapat menjamin terselenggaranya suatu lingkungan politik yang stabil. Selanjutnya demokrasi dipandang sebagai suatu sistem alamiah dan manusiawi sehingga semua

³ Marbun, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hlm. 115.

rakyat di Negara manapun akan memilih demokrasi bila mereka diberi kebebasan untuk melakukan pilihannya.⁴

Affan Gaffar menyatakan bahwa dalam ilmu politik, dikenal dua macam pemahaman tentang demokrasi yakni pemahaman secara normatif dan pemahaman secara empirik (*procedural democracy*). Dalam pemahaman secara normatif, demokrasi merupakan sesuatu yang secara idiil hendak dilakukan atau diselenggarakan oleh sebuah Negara, misalnya ungkapan pemerintah dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Ungkapan normatif tersebut biasanya diterjemahkan dalam Konstitusi pada masing-masing Negara.⁵

Meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, maka partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat disatu pihak dengan pemerintah di pihak lain. Partai politik umumnya dianggap sebagai manifestasi dari suatu sistem politik yang sudah modern atau yang sedang dalam proses modernisasi, dan di negara-negara barat partai politik sudah dianggap sebagai lembaga politik.

Di negara-negara yang menganut faham demokrasi, gagasan mengenai partisipasi rakyat mempunyai dasar ideologis, bahwa rakyat berhak turut menentukan siapa yang akan menjadi pimpinan yang pada akhirnya akan menentukan kebijakan pemerintah. sedangkan di negara-negara yang

⁴ M. Amien Rais, "Pengantar" dalam *Demokrasi dan Proses Politik, Kumpulan Karangan dari Majalah Prisma*, LP3ES, Jakarta, 1986, hlm. viii.

⁵ Afan Gaffar, *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000, hlm. 3-6.

menganut paham totaliter, gagasan mengenai partisipasi rakyat didasari pandangan elit politiknya bahwa rakyat perlu dibina untuk mencapai stabilitas yang langgeng.

Partai berasal dari kata *part* yang mempunyai arti *bagian* dan yang menunjuk bagian dari para warga suatu negara, sedangkan kata *partai-partai* menunjuk kepada sekumpulan orang-orang, jadi menunjuk kepada perkumpulan sejumlah warga dari suatu negara yang menggabungkan diri dalam suatu kesatuan yang mempunyai tujuan tertentu.⁶

Mengenai partai politik, banyak ilmuwan yang mengemukakan definisinya seperti yang diungkapkan Carl Friedrich yang memberikan batasan mengenai partai politik, yaitu: Sekelompok manusia yang terorganisasi secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya, dan berdasarkan kekuasaan itu akan memberikan kegunaan materiil kepada anggotanya.⁷

Sementara itu, Soltau memberikan definisi partai politik sebagai: Kelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisasi yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan untuk menguasai pemerintahan dan menjalankan kebijaksanaan umum mereka.⁸

Dari pendapat di atas dapat dikemukakan bahwa partai politik pada dasarnya mempunyai unsur-unsur yaitu, organisasi yang teratur, terdiri dari

⁶ Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, Hasta, Jakarta, 1990, hlm. 203.

⁷ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1992, hlm. 110.

⁸ *Ibid*, hlm. 110.

orang-orang yang mempunyai tujuan yang sama yaitu merebut dan atau mempertahankan kekuasaan.

Berkaitan dengan partai politik, Riswandha Ismawan mempunyai pendapat bahwa: Partai politik merupakan salah satu sarana, sekaligus yang paling utama untuk menyalurkan aspirasi politik massa. Fungsi partai yang terpenting adalah mengartikulasikan sekelompok orang dan menempatkan wakil-wakilnya dalam jaringan pengambilan keputusan (*decision maker*) hingga keputusan tersebut dapat diakui sebagai keputusan bersama masyarakat yang lebih berkuasa. Dengan demikian kebijaksanaan apapun yang dibuat oleh pemerintah, merupakan cerminan dan kelompok-kelompok masyarakat.⁹

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008, tentang Partai Politik, yang dimaksud dengan partai politik adalah: Organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.

Partai politik dalam negara demokratis menyelenggarakan beberapa fungsinya sesuai dengan tujuan partai politik tersebut. Di Indonesia selama Orde Baru berkuasa, partai politik tidak dapat melaksanakan fungsinya secara utuh. Pada masa itu partai politik hanya mampu memobilisasi massa untuk

⁹ Riswandha Ismawan, *Penyaluran Aspirasi Politik Masyarakat*, UII, Yogyakarta, 1991.

mendapatkan dukungan dalam mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan, fungsi-fungsi lain yang sangat penting tidak dapat dilaksanakan, seperti:¹⁰

1. Partai politik sebagai sarana komunikasi politik.
2. Partai politik sebagai sarana sosialisasi politik.
3. Partai politik sebagai sarana rekrutmen politik.
4. Partai politik sebagai sarana pengatur konflik.

Mengenai fungsi partai politik juga diatur dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yaitu sebagai sarana:

1. Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Republik Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara
2. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat.
3. Penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
4. Partisipasi politik warga Negara Indonesia, dan
5. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Dari berbagai fungsi tersebut, partai politik mempunyai kewajiban yang sangat penting, yaitu melaksanakan fungsi pendidikan politik terhadap anggotanya dan masyarakat luas. Partai politik wajib mendidik anggota-anggotanya menjadi manusia yang sadar akan tanggung jawab sebagai warga

¹⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1983, hlm. 163-164.

negara dan menempatkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan nasional. Hanya dengan pendidikan politik dapat diciptakan masyarakat yang cerdas dan sadar politik.

Dalam hal pendidikan politik, Matori Abdul Jalil mengemukakan bahwa: adalah kewajiban semua pelaku politik untuk melakukan penerangan dan pendidikan politik kepada rakyat, termasuk partai politik. Partai politik sekarang harus berbeda dengan partai politik pada masa Orde Baru. Pada saat sekarang partai politik tidak boleh hanya memperebutkan kursi kekuasaan, partai politik harus memasukkan pendidikan politik sebagai salah satu fungsi yang wajib dijalankan.¹¹

Pendidikan politik akan membantu masyarakat agar tidak mudah dimobilisir untuk melegitimasi dan menjustifikasikan kekuasaan dan kepentingan politik penguasa seperti yang terjadi pada masa Orde Baru.

Kalangan politisi memahami pentingnya pendidikan politik bagi rakyat, bahkan politisi di jaman kuno sampai dengan para pakar politik modern meyakini perlunya anggota masyarakat mendapatkan pendidikan politik agar bisa ikut aktif berpolitik dan melakukan kegiatan-kegiatan politik melalui lembaga-lembaga politik formal. Lembaga-lembaga politik dan partai politik dapat mengatur semua aspirasi politik yang ada di tengah masyarakat, kemudian juga bisa memperlunak atau meredam ledakan-ledakan kekuatan massa pada saat-saat yang kritis untuk dialihkan pada kegiatan-kegiatan yang konstruktif. Disamping itu juga, bisa menjinakkan dominasi satu kekuatan

¹¹ Harun Salim, Uzair Fauzan, Dinar Ibnu Sholeh, *Tujuh Mesin Pendulang Suara*, LKIS dan CH-PPS, Yogyakarta, 1999, hlm. 225.

sosial terhadap kelompok-kelompok sosial lainnya, sehingga semua pihak mendapatkan kesempatan yang sama untuk maju dan berkembang.

Semua anggota masyarakat secara langsung atau tidak langsung mengalami proses sosialisasi politik secara alamiah, proses sosialisasi politik, ini dilalui oleh orang kecil sampai dengan orang dewasa. Melalui sosialisasi politik, masyarakat mengenal, memahami dan menghayati nilai-nilai politik tertentu yang dapat mempengaruhi sikap dan tingkah laku politik mereka sehari-hari.

Sosialisasi politik ini dapat juga disebut dengan pendidikan politik dalam arti yang lebih luas. Suasananya akan menjadi berbeda kalau ada usaha untuk mengubah sosialisasi itu dengan memasukkan nilai-nilai politik baru yang dianggap ideal, dengan tujuan untuk mengarahkan proses sosialisasi politik masyarakat pada arah tertentu. Hal ini bisa juga dikatakan sebagai pendidikan dalam arti sempit, yaitu sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat, sehingga masyarakat memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal.

Definisi mengenai pendidikan politik itu sendiri menurut Kartono adalah: Upaya edukatif yang intensional, disengaja dan sistematis untuk membentuk individu yang sadar politik dan mampu menjadi pelaku politik yang bertanggung jawab secara emosional dalam mencapai tujuan-tujuan politik.¹²

¹² Kartono, *op.cit.*, hlm. 61.

Sedangkan menurut Hayer, pendidikan politik adalah: Usaha membentuk manusia menjadi partisipan yang bertanggung jawab dalam politik.¹³

Dari definisi yang telah disebutkan, pendidikan politik merupakan proses belajar, bukan hanya untuk menambah informasi dan pengetahuan saja, tetapi lebih menekankan kemampuan sadar akan situasinya secara kritis, menentukan sikap yang benar dan melatih ketangkasan aksi/berbuat. Pelaksanaan pendidikan politik di Indonesia guna meningkatkan pemahaman status diri sendiri selaku warga negara yang baik ditengah pergaulan hidup bersama serta menyadari fungsi politiknya selaku warga negara tidak luput dari hambatan dan kesulitan. Hal ini diakibatkan kondisi masyarakat yang banyak hidup dalam garis kemiskinan, latar belakang pendidikan rakyat yang rendah, sikap apatisme dan sinisme politik, kemudian masih adanya penguasa yang tidak menghendaki adanya pendidikan politik karena penguasa berkepentingan sekali dengan status quo.

E. Metode Penelitian

1. Obyek Penelitian

Pelaksanaan pendidikan politik oleh Partai Demokrat di Daerah Pemilihan IV Kabupaten Temanggung.

¹³ *Ibid*, hlm. 61.

2. Subyek Peneliti

Pengurus cabang dan anak cabang Partai Demokrat Kabupaten Temanggung.

3. Sumber Data

Data yang digunakan diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang terdiri dari:

- a. Data primer, data yang langsung di dapat dari subyek penelitian.
- b. Data sekunder, yaitu data kepustakaan yang terdiri dari:
 - 1) Bahan Primer, yaitu berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah ataupun Peraturan Menteri.
 - 2) Bahan Sekunder, yaitu berupa buku-buku literatur yang berkaitan dengan pendidikan politik.
 - 3) Bahan Tersier, yaitu berupa buku seperti Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Belanda atau Kamus Bahasa Inggris.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara, yaitu mengadakan tanya-jawab secara lisan dengan responden tentang hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan politik.
- b. Studi Kepustakaan, yaitu dilakukan dengan cara menelaah buku-buku, perundang-undangan, karya ilmiah maupun tulisan-tulisan ilmiah.

5. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah yuridis politik, yaitu meneliti obyek penelitian dari aspek aturan hukum dan dalam praktek politik.

6. Analisa Data

Data yang diperoleh dari penelitian baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, kemudian dianalisa dengan menggunakan metode diskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh di lapangan maupun di perpustakaan disusun secara sistematis setelah diseleksi berdasarkan permasalahan dan dilihat kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya disimpulkan sehingga diperoleh jawaban permasalahan tentang peranan partai politik terhadap pendidikan politik masyarakat.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG DEMOKRASI, PARTAI POLITIK

DAN PENDIDIKAN POLITIK

A. Demokrasi

Demokrasi telah menjadi salah satu kata yang sangat populer bagi kita khususnya dalam kehidupan berpolitik. Demokrasi sebagai satu prinsip yang menempatkan rakyat menjadi pusat pengambilan keputusan dalam perubahan sosial. Retorika yang berkembang saat ini dalam wacana demokrasi menfokuskan pada perlunya pemerintahan yang bersih serta peran masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik.

Gagasan bahwa masyarakat biasa harus diberi hak bersuara dalam pembuatan keputusan-keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka merupakan gagasan yang muncul sebagai suatu aspirasi dalam sejarah perkembangan masyarakat-masyarakat dunia. Gagasan ini mencapai bentuk kelembagaan klasik di Athena pada abad kelima dan keenam sebelum masehi. Sejak awal abad kelima, ketika kualifikasi kekayaan dihapuskan sebagai syarat untuk menduduki jabatan publik, setiap warga Athena mempunyai hak yang sama untuk mengambil bagian secara pribadi dalam diskusi-diskusi atau pemberian suara dilembaga perwakilan yang membahas masalah-masalah hukum dan berbagai kebijakan yang menyangkut masalah kehidupan bermasyarakat. Mereka juga mempunyai hak yang sama untuk menjalankan hukum serta kebijakan-kebijakan itu melalui aturan yuridis dan

kelembagaan-kelembagaan pemerintahan yang direkrut melalui undian dan rotasi, sejak saat itu contoh perwujudan nyata dari demokrasi ini menjadi acuan dan sumber utama dari para demokrat. Kenyataan bahwa perkembangan sistem demokrasi itu bersamaan dengan perkembangan seni budaya, ekonomi dan kelautan memberikan gambaran yang positif terhadap berlangsungnya sistem ini dalam kehidupan masyarakat Athena pada waktu itu.¹⁴

Demokrasi yang berlaku di Athena pada waktu itu dalam beberapa hal dapat dikatakan lebih demokratis dibandingkan kebanyakan praktek pelaksanaan demokrasi yang berjalan saat ini, akan tetapi untuk beberapa hal yang lain justru sangat tidak demokratis. Demokratisnya demokrasi di Athena pada waktu itu karena demokrasi yang berkembang atau berjalan adalah demokrasi langsung dimana masyarakat Athena mempunyai kebebasan untuk memilih wakil-wakilnya secara langsung dalam suatu proses pemilihan sedangkan demokrasi perwakilan yang berlaku saat ini menggunakan sistem demokrasi tidak langsung, dalam kenyataannya demokrasi langsung lebih dapat dipertanggungjawabkan sebab dalam proses pengambilan keputusan para pemilih memiliki cukup waktu serta kebebasan dari tanggungjawab-tanggungjawab lain. Hal ini yang diharapkan agar dapat memahami bukti alasan-alasan lain, sehingga dihasilkan keputusan yang sehat. Ketidakdemokratisannya demokrasi yang berlaku di Athena pada waktu itu adalah bahwa tidak semua warga negara yang seharusnya dapat menggunakan hak pilihnya dapat memilih wakil-wakilnya dalam proses pemilihan. Sebab hanya

¹⁴ David Bentham dan Kevin Boyle, *Demokrasi & Tanya Jawab*, Kanisius, Yogyakarta, 2000, hlm. 25-26.

kaum laki-laki-laki sajarah yang mempunyai hak pilih, laki-laki itupun harus yang lahir bebas dalam arti bukan seseorang yang lahir dari keturunan orang yang tidak memiliki kebebasan terhadap dirinya sendiri.¹⁵

Menurut Mac Iver demokrasi langsung yang berlaku di Yunani pada waktu itu bahkan dianggap bukan merupakan suatu bentuk pelaksanaan demokrasi akan tetapi lebih mirip kepada praktek oligarki, MacIver berpendapat demikian karena dalam praktek pelaksanaan demokrasi tersebut warga kota yang terdiri dari golongan kelas tertentu melakukan hak-hak mereka dan mendapatkan keuntungan dari para penguasa politik. Pelaksanaan demokrasi langsung ini pada zaman modern jarang dijumpai, lebih banyak ditemui pelaksanaan demokrasi tidak langsung yang merupakan perwujudan dari azas perwakilan, hampir semua negara menyatakan dirinya sebagai negara demokrasi dengan sistem ini. Pada tahun 1949 Unesco menyatakan bahwa demokrasi adalah nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukungnya yang berpengaruh. Meskipun demikian pelaksanaan demokrasi diberbagai negara tidak sama, sehingga dikenal adanya demokrasi konstitusional/liberal, demokrasi rakyat dan demokrasi pancasila. Ketiga konsep demokrasi ini bergantung pada kondisi kultural dan historis setiap negara sedangkan menurut bentuk dan isinya oleh Dr. Jitta dibedakan demokrasi menjadi dua, yaitu; demokrasi dalam arti formil dan demokrasi dalam arti materiil. Demokrasi dalam arti formil apabila demokrasi tersebut

¹⁵ *Ibid.* hlm. 26-27.

dilihat dari segi bentuk dan pemerintahannya dilakukan oleh orang banyak sedangkan apabila demokrasi dilihat dari isinya dan diselenggarakan untuk kepentingan orang banyak, maka demokrasi itu disebut sebagai demokrasi materiil.¹⁶

Gagasan demokrasi Yunani boleh dikatakan hilang dari dunia barat ketika bangsa romawi pada waktu itu dikalahkan oleh suku bangsa eropa barat dan benua eropa pada abad pertengahan yaitu 600-1400, masyarakat pada abad ini lebih bersifat feodal dimana masyarakat dalam kehidupan sosial maupun spiritualnya dikuasai oleh paus ataupun oleh pemuka agama lainnya, sedangkan kehidupan politik masyarakat pada waktu itu dikuasai oleh para bangsawan. Perkembangan demokrasi yang dihasilkan pada abad pertengahan ini adalah lahirnya deklarasi Magnacarta (1215). Piagam ini dianggap sebagai tonggak berkembangnya gagasan tentang demokrasi walaupun dalam kenyataannya piagam ini tidak berlaku untuk semua golongan kelas sosial masyarakat. Isi dari piagam ini adalah adanya perjanjian atau kontrak sosial antara raja inggris yaitu Raja John dan beberapa bangsawan dengan para pengikut atau bawahannya untuk mengakui dan menjamin beberapa hak dari para bawahan sebagai imbalan diserahkannya dan bagi keperluan perang dan sebagainya. Pada awal abad ke 16 muncul beberapa perkembangan pemikiran yang dapat memerdekakan manusia dari batasan-batasan yang diciptakan oleh para penguasa, yaitu dengan munculnya aliran atau faham renaissance pada (1350-1600) yang banyak berpengaruh di Eropa Selatan dan reformasi (1500-

¹⁶ M. Koesnadi dan Bintang R Saragih, *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1985, hlm. 165-166.

1650) yang banyak berpengaruh di Eropa Utara. Renaissance merupakan aliran yang menghidupkan kembali minat kesustraan dan kebudayaan Yunani, yang pada waktu itu telah disisihkan oleh pandangan-pandangan yang hanya berkonsentrasi pada masalah-masalah agama yang dijadikan dogma untuk menguasai manusia dalam berbagai bidang kehidupan yaitu di bidang sosial, politik, dan spiritual. Reformasi serta perang-perang agama yang muncul akhirnya menimbulkan gagasan mengenai perlunya kebebasan beragama dan pemisahan antara kehidupan bernegara dengan kehidupan beragama. Aliran Renaissance dan Reformasi yang berkembang pada masa itu menjadi awal mula berkembangnya aliran rasionalisme pada abad *Aufklärung* yaitu abad pemikiran. Aliran ini yang menghasilkan beberapa gagasan tentang hak-hak politik warga negara yang tidak boleh diselewengkan atau dilanggar bahkan oleh raja yang pada masa itu dianggap mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas. Kekuasaan raja-raja itu lebih lazim dikenal sebagai monarki absolut yang muncul pada tahun 1500-1700 Masehi, raja-raja absolut ini menganggap dirinya berhak atas tahtanya berdasarkan konsep hak suci raja sejak berakhirnya abad pertengahan. Keabsolutan raja-raja ini ditentang oleh golongan masyarakat menengah yang sebagian telah maju pendidikannya maupun segi ekonominya. Pergolakan terhadap raja-raja absolut ini didasarkan pada suatu teori rasionalitas yang umumnya dikenal sebagai *social contract* atau kontrak sosial yang didalamnya mengandung azas bahwa dunia berada di bawah kekuasaan hukum yang berasal dari alam, yang mengandung prinsip keadilan bagi seluruh manusia tanpa memandang ras, jabatan,

kekuasaan, kekayaan dan berlaku di setiap waktu. Kontrak sosial sesungguhnya merupakan suatu bentuk kesepakatan antara raja dengan rakyatnya dimana kedua belah pihak saling mengikatkan diri untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam hal ini raja bertanggungjawab terhadap keamanan, kesejahteraan dan ketertiban rakyatnya disisi lain rakyat harus patuh terhadap perintah dan segala peraturan yang dibuat oleh penguasa. Hak-hak politik rakyat perlu diperjuangkan oleh sebab itu menurut John Lock rakyat memiliki hak-hak politik yang mencakup hak hidup, hak untuk mendapatkan kebebasan, dan hak untuk memiliki sesuatu yang dikenal dengan *life, liberty and property*, sedangkan Montesquieu mencoba menyusun suatu sistem untuk dapat melindungi hak-hak politik rakyat dengan ajaran trias politiknya. Ide-ide ini menjadi sebab awal timbulnya revolusi perancis pada abad ke 18, revolusi amerika melawan inggris dan pada akhir abad ke 19 gagasan ini mendapat wujud yang nyata walaupun pada tahap ini demokrasi hanya semata-mata bersifat politis dengan mendasarkannya pada azas-azas mengenai kebebasan individu, persamaan hak (*equal right*), hak pilih untuk semua warga negara.¹⁷

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata *Demos* dan *Kratos*. *Demos* yang berarti rakyat dan *kratein* yang berarti pemerintahan maka demokrasi diartikan sebagai pemerintahan oleh rakyat. Gagasan demokrasi yang lahir pada zaman Yunani kuno itu memiliki pengertian lebih kurang yaitu, *rule by the masses* namun pada perkembangan selanjutnya makna

¹⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, hlm. 53-56.

demokrasi tergantung pada perkembangan pertarungan ideologi dan kepentingan politik serta ekonomi yang berkuasa. Setelah perang dunia kedua, akibat adanya konflik antar ablok barat yang berpaham kapitalis dan blok timur yang berhaluan sosialis, maka hal ini berpengaruh pada pengertian demokrasi itu sendiri. Di barat pengertian demokrasi lebih menekankan pada *liberty* atau kebebasan, sedangkan di timur lebih menekankan pada *equality* atau persamaan (keadilan). Di negara-negara timur pengertian demokrasi digunakan sebagai alat legitimasi dengan menekankan demokrasi rakyat atau demokrasi sentralisme walaupun secara politik hal ini dianggap sebagai demokrasi itu sendiri. Akibat kemenangan blok barat atas blok timur pada perang dingin tersebut maka paham demokrasi liberal menjadi sangat berpengaruh di dunia. Radmila Nakarada (1991), Seorang anggota Institute for European Studies di Beelgrade, Yugoslavia adalah salah seorang yang melakukan kritik model demokrasi liberal karena alasan ketidakadilan model demokrasi tersebut. Beberapa persoalan dalam demokrasi liberal antara lain *pertama*, hak-hak politik lebih mendapatkan keistimewaan dibandingkan hak sosial dan ekonomi (*social and economical rights*). Persoalan hak ekonomi dan sosial menjadi sangat penting untuk diperjuangkan mengingat eratnya hubunga antara marginalisasi ekonomi sebagian besar rakyat dan sistem politik suatu negara. *Kedua*, atas nama keamanan negara banyak pelanggaran hak-hak politik oleh agenda politik terselubung. Di Amerika misalnya, setiap kekuatan politik diluar sistem akan ditentang oleh kedua partai yang ada yaitu partai Republik dan partai Demokrat, sehingga mustahil terjadi pluralisasi

partai politik. *Ketiga*, partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan, terutama yang secara langsung menyangkut nasib mereka, terhalangi oleh prosedur demokrasi yang sering kali terjadi aliansi antara mereka yang duduk sebagai wakil rakyat dengan rakyat yang diwakilinya. *Keempat*, seringkali terjadi penggunaan standart ganda (*double standart*) bagi mereka yang tengah berkuasa baik pada penganut demokrasi liberal pada tingkat internasional maupun tingkat nasional. Di satu pihak mereka bersemboyan untuk mempromosikan *Principle of liberty* dan hak-hak manusia tetapi sepanjang menguntungkan kepentingan strategi kapitalisme.¹⁸

Juan Lunoz, seorang ilmuan politik yang banyak melakukan studi perbandingan politik mendefinisikan demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan yang memenuhi tiga syarat pokok, yaitu:¹⁹

1. Kompetisi yang sungguh dan meluas diantara individu-individu dan kelompok organisasi terutama partai politik untuk memperebutkan jabatan-jabatan pemerintahan yang memiliki kekuasaan efektif
2. Untuk jangka waktu regular tidak melibatkan atau menggunakan daya paksa
3. Partisipasi politik yang melibatkan sebanyak mungkin warga Negara dalam pemilihan atau kebijakan paling tidak melalui pemilihan umum yang diselenggarakan secara regular dan adil, sehingga tidak satupun kelompok social yang dikecualikan dari tingkat kebebasan sipil dan politik melalui kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan untuk membentuk

¹⁸ Dadang Juliantara, *Meretas Jalan Demokrasi*, Kanisius, Yogyakarta, 1998, hlm. 8.

¹⁹ Sutarjo Adisusilo, *Demokrasi dan Pasang Surutnya*, Basis, Jakarta, 1983, hlm. 44

dan bergabung dalam organisasi yang cukup guna menjamin integritas kompetisi dan partisipasi politik.

Untuk membuat suatu demokrasi yang efektif tidak hanya diperlukan bermacam-macam lembaga dan jaminan tetapi juga sikap hidup saling menghormati, menghargai dan toleransi antar warga masyarakat. Sehingga suatu negara yang demokrasi harus menghargai dan menjamin hak-hak minoritas serta perorangan.²⁰

Menurut Henry B. Mayo, syarat-syarat suatu negara demokrasi adalah:²¹

1. Mampu menegakkan keadilan dalam masyarakat
2. Mampu menyelesaikan perbedaan-perbedaan pendapat dan pandangan secara damai serta musyawarah
3. Dijaminnya keamanan pribadi
4. Kebebasan agama dan kebebasan dalam menunaikan kepercayaannya
5. Dijaminnya kebebasan pengadilan
6. Dihapuskannya segala bentuk diskriminasi

Lebih jauh ditegaskan oleh Robert A. Dahl, sebagaimana dikutip Affan Ghafar bahwa beberapa persyaratan untuk menunjukkan indikasi empirik dari sebuah demokrasi adalah:²²

1. Terdapat kontrol atas kebijakan pemerintah.

²⁰ Didik Mas'adi, *Pembentukan Mahkamah Konstitusi Dalam Kaitannya Dengan Penyelenggaraan Negara Demokrasi*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2003, hlm. 40.

²¹ Sutardo Adisusilo, *op.cit.*, hlm. 44-45.

²² Affan Ghafar, *loc.cit.*

2. Adanya pemilihan umum yang diadakan secara damai dalam jangka waktu tertentu, terbuka dan bebas dimana didalamnya kekerasan dapat dibatasi.
3. Semua orang dewasa mempunyai hak untuk memberikan suara dalam pemilu.
4. Hampir semua orang dewasa mempunyai hak untuk mencalonkan diri menjadi kandidat dalam pemilu.
5. Warga negara yang mempunyai hak-hak seperti kebebasan berekspresi terutama ekspresi politiknya untuk melakukan pengkritikan terhadap pemerintah.
6. Mereka juga mempunyai akses untuk mendapat informasi alternative yang telah dimonopoli oleh pemerintah atau kelompok lain.
7. Mereka mempunyai hak untuk membentuk dan bergabung dengan lembaga-lembaga yang otonom termasuk lembaga-lembaga politik seperti partai politik dan kelompok-kelompok kepentingan yang berusaha untuk mempengaruhi pemerintah dengan ikut dalam pemilu dan perangkat-perangkat lainnya.

Sejumlah ilmuwan politik juga merumuskan syarat-syarat demokrasi secara empirik yang dapat dijadikan indikator pelaksanaan demokrasi, yaitu:²³

1. Akuntabilitas. Dalam demokrasi setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya. Pertanggungjawaban tersebut tidak hanya menyangkut dirinya, tetapi juga keluarga dalam arti luas. Dalam konteks

²³ Affan Ghafar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000, hlm. 7-8

ini, pemegang jabatan harus bersedia menghadapi apa yang disebut “*public security*” terutama yang dilakukan oleh media massa

2. Rotasi Kekuasaan. Peluang akan terjadi rotasi kekuasaan harus ada dan dilakukan secara teratur serta damai. Biasanya partai politik yang menang dalam pemilu akan diberikan kesempatan untuk membentuk eksekutif yang akan mengendalikan pemerintahan sampai pemilihan umum berikutnya.
3. Rekrutmen Politik yang Terbuka. Untuk meningkatkan terjadinya rotasi kekuasaan diperlukan suatu system rekrutmen politik yang terbuka, artinya setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi suatu jabatan politik yang dipilih oleh rakyat mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi mengisi jabatan tersebut.
4. Pemilihan Umum. Dalam suatu negara demokrasi, pemilihan umum dilaksanakan secara teratur dimana setiap warga negara yang sudah dewasa mempunyai hak untuk memilih dan dipilih serta bebas menggunakan haknya tersebut sesuai dengan kehendak hati nuraninya. Mereka juga bebas untuk menentukan partai atau calon mana yang akan didukungnya tanpa ada rasa takut atau paksaan dari orang lain. Pemilih juga bebas untuk mengikuti segala macam aktivitas pemilihan termasuk didalamnya kegiatan kampanye dan menyaksikan perhitungan suara.
5. Menikmati Hak-hak Dasar. Dalam suatu negara demokrasi setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas, termasuk didalamnya adalah hak-hak dasar untuk menyatakan pendapat (*freedom of*

expreition), hak untuk berserikat dan berkumpul (*freedom of assembly*), dan hak untuk menikmati pers yang bebas (*freedom of the press*). Hak untuk menyatakan pendapat dapat digunakan untuk menentukan preferensi politiknya tentang suatu masalah terutama yang menyangkut dirinya dan masyarakat sekitarnya. Hak untuk berkumpul dan berserikat ditandai dengan kebebasan untuk menentukan lembaga atau organisasi manapun yang ingin dia bentuk atau pilih.

Samuel P. Huntington mengemukakan bahwa variable-variabel yang memberikan kontribusi besar bagi tegaknya demokrasi adalah:²⁴

1. Tingkat kemakmuran ekonomi secara menyeluruh yang tinggi.
2. Distribusi pendapatan dan atau kekayaan yang relatif merata.
3. Ekonomi pasar.
4. Perkembangan ekonomi dan modernisasi masyarakat.
5. Aristokrasi feodal pada suatu ketika dalam sejarah masyarakat.
6. Budaya feodalisme dalam masyarakat.
7. Borjuasi yang kuat.
8. Kelas menengah yang kuat.
9. Budaya yang bersifat instrumental atau idealis.
10. Profesionalisme.
11. Pluralisme sosial dan kelompok-kelompok menengah yang kuat.
12. Berkembangnya kompetisi politik sebelum perluasan partisipasi politik.

²⁴ Samuel P. Huntington, *Demokrasi Ketiga*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1999, hlm. 97-98.

13. Struktur kewenangan demokrasi didalam kelompok-kelompok sosial khususnya yang berkaitan dengan politik.
14. Tingkat tindakan kekerasan oleh sifat yang rendah. Pemimpin-pemimpin politik yang mendukung demokrasi dengan sepenuh hati.
15. Pengalaman sebagai sebuah koloni negara lain.
16. Tradisi toleransi dan kompromi.
17. Pendudukan oleh suatu kekuatan asing yang pro demokrasi.
18. Pengaruh dari suatu kekuatan asing yang pro demokrasi.
19. Pasrat kelompok elit untuk meniru bangsa-bangsa yang demokrasi.
20. Tradisi menghormati hukum dan hak-hak individu.
21. Homogenitas komunal (etnis, rasial dan keagamaan).
22. Heterogenitas komunal (etnis, rasial dan keagamaan).
23. Konsensus mengenai nilai-nilai politik dan sosial.
24. Tiadanya konsensus mengenai politik dan sosial.

B. Pengertian Partai Politik

Kelahiran Partai Politik tidaklah terlepas dari sejarah perkembangan ketatanegaraan di Inggris. Gloria revolusi setidaknya merupakan faktor awal yang mendorong kelahiran partai politik. Gloria revolusi melahirkan parlemen pertama di dunia modern, yakni dengan lahirnya *House of Lord*, sebagai tuntutan para bangsawan. Lembaga ini pada mulanya hanya sebagai badan penasihat raja yang anggota terdiri dari bangsawan. Dalam perkembangannya kemudia *House of Lord* menjadi semakin kuat dan

akhirnya merupakan lembaga pertama yang mengontrol kekuasaan raja. Perkembang selanjutnya dari revolusi itu adalah terbentuknya *House of Common*. Dinamakan *House of Common* karena keanggotaanya terdiri dari orang kebanyakan dalam pengertian bukan para bangsawan. Lahirnya lembaga ini, sebenarnya berkaitan dengan tuntutan rakyat yang terkena pajak, karena dalam penetapan pajak kaum bangsawan tidak dikenakan kewajiban untuk itu. Dengan adanya lembaga ini, rakyat yang terkena pajak menuntut agar mereka dilibatkan dalam menentukan perpajakan.

Perkembangannya selanjutnya, untuk mengisi keanggota *House of Common* dilakukan pemilihan. Untuk memenangkan pemilihan, kelompok elit dalam masyarakat dan dalam parlement kemudian membentuk panitia-panitia untuk mencari pendukung untuk tokohnya. Bagi mereka yang merasa sepaham dengan pandangan politik dari tokoh yang akan didukungnya kemudian membentuk masa tersendiri. Disinilah panitia dan kelompok pendukungnya inilah sebagai cikal bakal kelahiran Partai Politik.

Kemudian kehadiran partai politik tidaklah dapat diterima secara serta merta terutama dalam abad 18, tetapi diterima secara gradual melauli proses yang panjang. Hal ini berkaitan dengan pemahan masyarakat Eropa saat itu, dimana partai masih dipahami sebagai faksi yang pada masa itu mempunyai konotasi yang negatif yakni sebagai organisasi penghasut.

Huntington mengkalisifikasikan pertumbuhan dan perkembangan partai ke dalam 4 (empat) tahap yakni:²⁵

²⁵ Cipto, *Sejarah Partai Politik di Dunia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hlm. 2.

1. Faksionalisasi, masyarakat baru mengenal partai suatu invensi kultural bari di tengah rendahnya tingkat partisipasi dan pelembagaan politik. Pada tahap ini separuh dari kesadaran politik masyarakat sudah mulai meninggalkan bentuk-bentuk organisasi politik tradisional. Namun pada saat bersamaan belum menemukan penggantinya yang sesuai dengan tuntutan keadaan, politik ditandai dengan persaingan sengit antar kelompok atau faksi yang berusaha memperebutkan kekuasaan dan pengaruh, masyarakat masih sangat asing dengan dua ciri organisasi politik modern, yakni, organisasi profesional dan basis sosial pendukung organisasi politik tersebut.
2. Polarisasi, dalam tahap ini partai tampak berusaha menerobos dinding-dinding sosial tradisional yang melindungi faksi yang saling bersaing secara presonal. Proses tinggal landas ini didukung oleh kondisi eksternal yang cukup memadai. Meningkatnya kesadaran politik warganegara dengan sendirinya memperluas ruanglingkup partisipasi politik. Momen penting ini segera diikuti dengan meluasnya jenis dan macam kelompok-kelompok politik yang menghasilkan sebuah masyarakat majemuk dan kompleks. Heterogenitas masyarakat modern di tengah perubahan sosial ekonomi secara perlahan-lahan menumbuhkan polarisasi kelompok sebagai akibat dari makin kompleksnya masyarakat politik.
3. Ekspansi atau perluasan, pada tahap ini partai telah berkembang menjadi organisasi politik yang semakin membutuhkan dukungan massa. Dalam persaingan antar partai dukungan massa yang luas dan beragam serta

berlapis merupakan syarat pokok untuk membangun kekuatan partai, partisipasi politik masyarakat meluap dan memerlukan kontribusi partai sebagai agregator kepentingan umum.

4. Pelembagaan adalah tahap akhir dari pertumbuhan partai politik, dimana partai relatif telah mencapai tahap mapan, dengan ditandai terbentuknya sistem dua partai, sistem multipartai atau sistem partai tunggal dominan. Sistem partai yang telah terlembaga relatif tidak banyak mengalami perubahan kuantitas. Pergantian lebih banyak terjadi pada aspek peralihan pemerintahan oleh partai atau koalisi partai lain.

Partai berasal dari bahasa Latin, yaitu *partire* yang bermakna membagi. Partai merupakan peralihan jangka panjang dari istilah faksi, dimana faksi di Eropa pada masa lalu sekitar abad XVIII memiliki konotasi negatif dan sangat dikenal sebagai organisasi penghasut yang ada dalam setiap bentuk organisasi politik. Faksi berasal dari bahasa Latin, yakni *facere* yang artinya bertindak atau berbuat, dalam pengertian politik faksi adalah kelompok yang melakukan tindakan-tindakan merusak, kejam dan bengis. Pembicaraan tentang faksi biasanya mengarah pada pembicaraan kelompok di mana kepentingan bersama harus tunduk pada kepentingan perorangan.²⁶

Partai Politik sebagai pengelompokan masyarakat berdasarkan kesamaan *platform* politik merupakan suatu keharusan dalam negara demokrasi serta merupakan produk dari demokrasi dan modernisasi. Kehadiran Partai Politik memperlihatkan bahwa di dalam masyarakat tersebut

²⁶ *Ibid*, hal. 4.

terdapat berbagai pendapat, tujuan dan kepentingan. Bagi manusia Partai Politik menjadi alat yang tangguh untuk mencapai tujuan-tujuan politiknya. Secara umum dapat dikatakan bahwa Partai Politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.²⁷

Soltau memberikan pengertian Partai Politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih serta bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka.²⁸

Sigmund Neumann mengemukakan definisi Partai Politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan yang mempunyai pandangan berbeda.²⁹

Secara garis besar Partai Politik memiliki unsur-unsur yaitu, merupakan kumpulan orang yang terorganisir, mempunyai tujuan atau kepentingan yang sama, berusaha melebur dan mempertahankan kekuasaan serta berusaha menempatkan wakil-wakilnya dalam pemerintah melalui saluran yang konstitusional.

²⁷ Miriam Budiardjo, *op.cit.*, 160.

²⁸ *Ibidi*, hlm. 160.

²⁹ *Ibid*, hlm. 162.

Dalam literatur politik, kita juga mengenal yang namanya kelompok kepentingan atau *intrest group* dan kelompok penekan atau *pressure group*. Kedua kelompok ini meski memperjuangkan kepentingan kelompoknya tetapi mereka tidak dapat kata sebagai partai politik. Kelompok Kepentingan adalah merupakan suatu organisasi yang terdiri dari kelompok individu yang mempunyai kepentingan-kepentingan, tujuan-tujuan, keinginan-keinginan yang sama, dan mereka melakukan kerja sama untuk mempengaruhi kebijaksanaan pemerintahan demi tercapainya kepentingan-kepentingan, tujuan-tujuan dan keinginan-keinginan tadi.

Perbedaan kedua antara partai politik dengan kelompok kepentingan adalah bahwa:³⁰

1. Partai Politik berusaha untuk memperoleh kekuasaan yang pada gilirannya akan dipergunakan untuk mengendalikan/mengontrol jalannya roda pemerintahan dalam usahanya merealisasikan atau mewujudkan program-program yang telah ditetapkan.
2. Kelompok Kepentingan hanya berusaha untuk mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah dalam rangka agar dapat terpenuhi kepentingan-kepentingan atau mencegah kebijaksanaan Pemerintahan yang mungkin dapat merugikan dan dalam waktu yang sama kelompok kepentingan tidak berusaha untuk memperoleh jabatan publik.

³⁰ Miriam Budiardjo, *op.cit.*, hlm. 165.

C. Perkembangan Partai Politik Di Indonesia

1. Jaman Penjajahan Belanda³¹

Pada masa ini, Partai Politik (Parpol) tidak dapat hidup tentram. Jika ada parpol yang sifatnya menentang, maka akan segera dilarang oleh Pemerintah Belanda dan pemimpinnya diasingkan atau dipenjarakan. Partai pertama yang berdiri di Indonesia yaitu *Indische Partij*. Partai ini didirikan 25-12-1912 di Bandung. Dipimpin oleh 3 serangkai yaitu: Douwes Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Tujuan partai ini adalah melepaskan Hindia (Indonesia) dari Netherland (Belanda). Namun, partai ini cuma berusia 8 bulan, karena pemimpinnya masing-masing diasingkan ke Kupang, Bangka dan Banda kemudian diasingkan ke Netherland. Tahun 1919, setelah pulang dari Netherland, mereka mendirikan *National Indische Partij* yang dipimpin Ki Hajar Dewantara dan Douwes Dekker. Berdirinya N.I.P disusul beberapa partai. Yaitu: ISDV, PNI, Partai Indonesia, dan Partai Indonesia Raya.

2. Jaman Penjajahan Jepang³²

Semula Jepang melarang adanya parpol. Namun, kemudian mereka menyetujui berdirinya Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA) yang dipimpin 4 serangkai yaitu: Ir. Sukarno, Drs. Moh. Hatta, Ki Hajar Dewantara, Ki Haji Mansyur. Pada akhirnya partai ini bubar Bulan Maret 1944 atas perintah Jepang.

³¹ Partai Politik dan Sajarahnya, <http://www.pks-jaksel.or.id>

³² Ullia Fionna, *Perkembangan Kelembagaan Partai Politik di Indonesia*, <http://www.ahmadheryawan.com/opini-media/sosial-politik/1909>

3. Jaman Kemerdekaan³³

Pada 3 November 1945, Pemerintah mengeluarkan maklumat yang salah satunya berisi bahwa pemerintah menginginkan timbulnya parpol agar rakyat dapat lebih mudah diatur. Parpol-parpol pun bermunculan sehingga pemilu pada tahun 1955 diikuti 28 parpol dan organisasi politik. Ironisnya, banyaknya parpol membuat pemerintahan jadi tidak stabil. Kabinet bergonta-ganti dalam waktu singkat. Akhirnya pemerintah menerapkan demokrasi terpimpin dan mengangkat Suharto menjadi presiden. Berdasar Putusan Presiden No. 43 Tahun 1970, hanya 9 partai yang diakui dan dapat ikut pemilu tahun 1971, yakni PNI, NU, Partai Katolik, Partai Murba, PSII, IPKI, Parkindo, Perti, Parmusi. Untuk memperkuat birokrasi pemerintahan, Presiden Suharto membentuk sekretariat bersama Golkar. Pada 5 Januari 1973, NU, Parmusi, PSII, Partai bersatu menjadi parpol bernama Partai Persatuan Pembangunan. Pada 10 Januari 1973, PNI, Partai Katolik, IPKI, Parkindo, Partai Murba bersatu menjadi parpol bernama Partai Demokrasi Indonesia. Sesuai Tap MPR No. VIII/1973, pemilu paling lambat dilaksanakan pada akhir tahun 1977. Pemilu diikuti oleh PPP, PDI, dan Golkar. Selama orba, Indonesia melaksanakan pemilu pada tahun 1977, 1982, 1987, 1992, 1997.

4. Jaman Reformasi

Reformasi lahir setelah runtuhnya rezim orba yang ditandai dengan mundurnya Presiden Suharto pada 21 Mei 1998. Pada jaman

³³ <http://dismas070492.wordpress.com/2009/08/12/sejarah-perkembangan-parpol-di-indonesia/>

reformasi, peran parpol sangat besar dalam pemerintahan. Keberadaan parpol sangat berhubungan erat dengan kiprah para elite politik. Intinya, hakikat reformasi adalah tampilnya partisipasi penuh kekuatan-kekuatan masyarakat yang disalurkan lewat parpol sebagai pilar demokrasi. Dengan keluarnya UU No. 2 Tahun 1999 dan disempurnakan UU No. 3 Tahun 2002, serta diperbaharui lagi dengan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, maka banyak bermunculan partai politik di Indonesia.

D. Sistem Partai Politik

Sistem politik Indonesia telah menempatkan Partai Politik sebagai pilar utama penyangga demokrasi. Artinya tidak ada demokrasi tanpa Partai Politik. Oleh karena begitu pentingnya peran Partai Politik, maka sudah selayaknya jika diperlukan sebuah peraturan perundang-undangan mengenai Partai Politik. Peraturan perundang-undangan ini diharapkan mampu menjamin pertumbuhan Partai Politik yang baik, sehat, efektif dan fungsional.

Kondisi Partai Politik yang sehat dan fungsional, maka memungkinkan untuk melaksanakan rekrutmen pemimpin atau proses pengkaderan, pendidikan politik dan kontrol sosial yang sehat. Dengan Partai Politik pula, konflik dan konsensus dapat tercapai guna mendewasakan masyarakat. Konflik yang tercipta tidak lantas dijadikan alasan untuk memecah belah partai, tapi konflik yang timbul dicarikan konsensus guna menciptakan partai yang sehat dan fungsional.

Pentingnya keberadaan Partai Politik dalam menumbuhkan demokrasi harus dicerminkan dalam peraturan perundang-undangan. Seperti diketahui hanya Partai Politik yang berhak mengajukan calon dalam Pemilihan Umum. Makna dari ini semua adalah, bahwa proses politik dalam Pemilihan Umum (Pemilu), jangan sampai mengebiri atau bahkan menghilangkan peran dan eksistensi Partai Politik. Kalaupun saat ini masyarakat mempunyai penilaian negatif terhadap Partai Politik, bukan berarti lantas menghilangkan eksistensi partai dalam sistem ketatanegaraan. Semua yang terjadi sekarang hanyalah bagian dari proses demokrasi.

Menumbuhkan Partai Politik yang sehat dan fungsional memang bukan perkara mudah. Diperlukan sebuah landasan yang kuat untuk menciptakan Partai Politik yang benar-benar berfungsi sebagai alat artikulasi masyarakat. Bagi Indonesia, pertumbuhan Partai Politik telah mengalami pasang surut. Kehidupan Partai Politik baru dapat dilacak kembali mulai tahun 1908. Pada tahap awal, organisasi yang tumbuh pada waktu itu seperti Budi Oetomo belum bisa dikatakan sebagaimana pengertian Partai Politik secara modern. Budi Utomo tidak diperuntukkan untuk merebut kedudukan dalam negara (*public office*) di dalam persaingan melalui Pemilihan Umum. Juga tidak dalam arti organisasi yang berusaha mengendalikan proses politik. Budi Oetomo dalam tahun-tahun itu tidak lebih dari suatu gerakan kultural, untuk meningkatkan kesadaran orang-orang Jawa.

Boleh jadi partai dalam arti modern sebagai suatu organisasi massa yang berusaha untuk mempengaruhi proses politik, merombak kebijaksanaan

dan mendidik para pemimpin dan mengejar penambahan anggota, baru lahir sejak didirikan Sarekat Islam pada tahun 1912. Sejak itulah partai dianggap menjadi wahana yang bisa dipakai untuk mencapai tujuan-tujuan nasionalis. Selang beberapa bulan, lahir sebuah partai yang di dirikan Douwes Dekker guna menuntut kebebasan dari Hindia Belanda. Dua partai inilah yang bisa dikatakan sebagai cikal bakal semua Partai Politik dalam arti yang sebenarnya yang kemudian berkembang di Indonesia.

Pada masa pergerakan nasional ini, hampir semua partai tidak boleh berhubungan dengan pemerintah dan massa di bawah (*grass roots*). Jadi yang di atas, yaitu jabatan puncak dalam pemerintahan kolonial, tidak terjangkau, ke bawah tidak sampai, tetapi Partai Politik menjadi penengah, perumus ide. Fungsi Partai Politik hanya berkisar pada fungsi sosialisasi politik dan fungsi komunikasi politik.

Pada masa pendudukan Jepang semua Partai Politik dibubarkan. Namun, pada masa pendudukan Jepang juga membawa perubahan penting. Pada masa Jepang-lah didirikan organisai-organisasi massa yang jauh menyentuh akar-akar di masyarakat. Jepang mempelopori berdirinya organisasi massa bernama Pusat Tenaga Rakyat (Poetera). Namun nasib organisasi ini pada akhirnya juga ikut dibubarkan oleh Jepang karena dianggap telah melakukan kegiatan yang bertujuan untuk mempengaruhi proses politik. Praktis sampai diproklamirkan kemerdekaan, masyarakat Indonesia tidak mengenal partai-partai politik.

Dalam kondisi kepartaian yang seperti ini, Pemilihan Umum 2009 digelar dengan bersandar kepada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Dalam perjalanannya, undang-undang ini di anggap belum mampu mengantarkan sistem kepartaian dan demokrasi perwakilan yang efektif dan fungsional. Undang-undang ini juga belum mampu melahirkan Partai Politik yang stabil dan akuntabel. Masyarakat juga masih belum percaya pada keberadaan Partai Politik, padahal fungsi Partai Politik salah satunya adalah sebagai alat artikulasi kepentingan rakyat. Untuk menciptakan Partai Politik yang efektif dan fungsional diperlukan adanya kepercayaan yang penuh dari rakyat. Tanpa dukungan dan kepercayaan rakyat, Partai Politik akan terus dianggap sebagai pembawa ketidakstabilan politik sehingga kurang berkah bagi kehidupan rakyat.

Untuk menciptakan sistem politik yang memungkinkan rakyat menaruh kepercayaan, diperlukan sebuah peraturan perundang-undangan yang mampu menjadi landasan bagi tumbuhnya Partai Politik yang efektif dan fungsional. Dengan kata lain, diperlukan perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem Politik Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Sistem dalam Partai Politik adalah proses pelaksanaan fungsi-fungsi Partai Politik, termasuk penyelesaian konflik, dilakukan menurut aturan, persyaratan, prosedur, dan mekanisme yang disepakati dan ditetapkan dalam AD/ART Partai Politik. Derajat kesisteman suatu partai bervariasi, yaitu menurut:

1. Asal-usul Partai Politik, yaitu apakah dibentuk dari atas, dari bawah, atau dari atas yang disambut dari bawah;
2. Siapakah yang lebih menentukan dalam partai: seorang pemimpin partai yang disegani atau pelaksanaan kedaulatan anggota menurut prosedur dan mekanisme yang ditetapkan oleh organisasi sebagai suatu kesatuan;³
3. Siapakah yang menentukan dalam pembuatan keputusan: faksi-faksi dalam partai atau partai secara keseluruhan; dan
4. Bagaimana partai memelihara hubungan dengan anggota dan simpatisan, yaitu apakah dengan klientelisme (pertukaran dukungan dengan pemberian materi) atau menurut konstitusi partai (AD/ART).

Titik terlemah Partai Politik di Indonesia adalah belum ada kesisteman dalam suatu partai. Kebanyakan Partai Politik, termasuk Partai Politik yang telah memenuhi ketentuan electoral threshold, memiliki derajat kesisteman yang rendah karena keempat indikator tersebut, tetapi terutama karena peran pemimpin partai lebih dominan daripada kedaulatan anggota dan kepentingan faksi, kelompok dan golongan lebih dominan daripada kepentingan partai sebagai organisasi. Pemimpin yang dominan dalam suatu Partai Politik tidaklah dengan sendirinya buruk. Peran pemimpin dominan akan

menimbulkan akibat buruk apabila sang pemimpin menggunakan kharismanya untuk melanggengkan dominasinya, sedangkan peran dominan pemimpin akan menimbulkan akibat yang positif bila sang pemimpin menggunakan kharismanya membangun kesisteman dalam partai.

Fraksi dan pengelompokan di dalam partai juga tidak dengan sendirinya buruk, bila pengelompokan di dalam partai terbentuk atas dasar primordial, maka pengelompokan akan merusak solidaritas partai karena akan menimbulkan konflik *zero-sum* (yang menang mendapatkan semuanya, yang kalah tidak mendapatkan apa-apa). Akan tetapi bila pengelompokan berdasarkan perbedaan orientasi (pola dan arah) kebijakan, maka pengelompokan itu justru akan mendinamiskan partai karena konflik yang timbul justru *non zero sum* (menang-menang alias semua kelompok menang). Untuk membangun kesisteman dalam setiap Partai Politik dapat ditempuh dengan undang-undang, tetapi dapat pula ditempuh dengan ‘pasar’ (diserahkan pada penilaian warga masyarakat).

Dalam rangka membangun kesisteman ini, pada Undang-undang Partai Politik perlu dimuat ketentuan yang mengharuskan setiap Partai Politik merumuskan AD/ART secara mendetail, dan ketentuan yang memuat jenis keputusan perihal apa saja yang harus diputuskan melalui rapat anggota. Setidak-tidaknya tiga isu harus diputuskan melalui mekanisme rapat anggota sesuai dengan tingkatannya, yaitu:

1. Penentuan pengurus Partai Politik pada semua tingkatan.

2. Penentuan calon Partai Politik untuk jabatan legislatif (DPR dan DPRD), eksekutif (Presiden/Wakil Presiden, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah) dan jabatan publik lainnya, dan.
3. Penentuan kebijakan Partai Politik mengenai peraturan perundang-undangan, dan kebijakan publik pada umumnya.

Setiap Partai Politik harus berangkat dari kerangka berpikir bahwa konflik niscaya akan terjadi dalam Partai Politik, setidaknya-tidaknya dalam ketiga isu yang disebutkan di atas, karena itu Partai Politik dari asalnya memang merupakan wadah konflik atau wadah mengatur dan menyelesaikan konflik setidaknya-tidaknya dalam ketiga isu tersebut.

Apabila mencermati peran eksternal Partai Politik, maka dapat disimpulkan bahwa Partai Politik juga merupakan peserta konflik dalam pemilihan umum dan dalam pembuatan keputusan di lembaga legislatif. Bahkan dari fungsinya, Partai Politik berfungsi menampung dan mengagregasikan berbagai kepentingan yang berbeda bahkan bertentangan menjadi suatu alternatif kebijakan publik. Dengan melaksanakan fungsi agregasi kepentingan ini, Partai Politik berarti juga berperan sebagai pihak yang menyelesaikan konflik.

Identitas nilai Partai Politik berkaitan dengan identitas partai politik berdasarkan ideologi atau platform partai, dan karena itu berdasarkan basis sosial pendukungnya, dan identifikasi anggota terhadap pola dan arah perjuangan yang diperjuangkan Partai Politik tersebut, oleh karena itu derajat identitas nilai suatu Partai Politik berkaitan dengan;

1. Hubungan partai dengan kelompok populis tertentu (*popular bases*), yaitu apakah suatu Partai Politik mengandung dimensi sebagai gerakan sosial yang didukung oleh kelompok populis tertentu, seperti buruh, petani, kalangan masyarakat tertentu, komunitas agama tertentu, komunitas kelompok etnik tertentu, dan.
2. Pengaruh klientelisme dalam organisasi, yaitu apakah hubungan partai dengan anggota cenderung bersifat instrumental (anggota selalu mengharapkan *tangible resources* berupa materi dari partai) ataukah lebih bersifat ideologis (anggota mengenal dan mengharapkan partai bertindak berdasarkan identifikasi terhadap ideologi partai).

Partai Politik yang mempunyai basis sosial pendukung yang spesifik niscaya akan memiliki identitas nilai yang jelas. Partai buruh sesuai dengan namanya jelas memiliki basis sosial pendukung yang jelas, karena pola dan arah perjuangan partai itu memperhatikan kepentingan buruh, dan Partai Republik di Amerika Serikat memiliki basis sosial pendukung yang jelas, yaitu kulit putih menengah ke atas beragama Protestan. Enam Partai Politik peserta pemilu yang pada 1999 yang berhasil memenuhi ketentuan *electoral threshold*, memang sudah memiliki ciri ideologi yang dikenal masyarakat, seperti nasionalisme/kebangsaan untuk PDIP dan Partai Golkar, Islam untuk PPP, NU untuk PKB, dan Muhammadiyah untuk PAN. Akan tetapi pola dan arah program kebijakan publik yang diperjuangkannya belum jelas sehingga perbedaan diantara Partai Politik tersebut juga tidak jelas. Karena

itu, masih sukar mengkategorikan basis sosial pendukung setiap Partai Politik di Indonesia.

Sistem kepartaian yang dipandang cocok dan sesuai dengan kemajemukan masyarakat Indonesia tetapi pada pihak lain dapat menghasilkan pemerintahan yang efektif adalah sistem kepartaian pluralisme moderat yang ditandai oleh jumlah partai yang tidak terlalu banyak tetapi juga tidak terlalu sedikit dan jarak ideologi antar partai juga tidak terlalu jauh sehingga konsensus masih mungkin dicapai.

Untuk mewujudkan sistem kepartaian seperti ini terbuka tiga alternatif pendekatan:

- a. Cara Orde Baru, yaitu menetapkan hanya sekian jumlah Partai Politik yang dapat berkiprah.
- b. Secara alamiah tanpa melakukan “intervensi” dalam bentuk apapun juga.
- c. Melakukan seleksi berdasarkan kriteria ataupun persyaratan dukungan rakyat yang ditetapkan dalam undang-undang.

Pendekatan pertama dianggap tidak demokratis, sedangkan pendekatan kedua sangat demokratis tetapi memerlukan waktu yang sangat lama untuk mencapai sistem kepartaian yang dikehendaki. Pendekatan ketiga dipandang lebih tepat untuk mencapai sistem kepartaian tersebut karena selain bersifat selektif berdasarkan kriteria dan persyaratan dukungan rakyat yang disepakati bersama dalam undang-undang juga relatif lebih cepat mencapai sistem kepartaian yang dikehendaki bersama.

Kriteria dan persyaratan itu dapat berupa persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu Partai Politik untuk dapat menjadi peserta pemilihan umum dan/atau *electoral threshold* yang diberlakukan didepan, yaitu persyaratan jumlah suara minimal yang harus dicapai untuk dapat memasuki parlemen.

E. Fungsi Partai Politik

Pada permulaannya fungsi dan peran partai politik di negara-negara Barat bersifat elitis dan aristokratis, dalam arti terutama mempertahankan kepentingan golongan bangsawan terhadap tuntutan raja, namun dalam perkembangannya kemudian peranan tersebut meluas dan berkembang ke segenap lapisan masyarakat. Hal ini antara lain disebabkan oleh perlunya dukungan yang menyebar dan merata dari semua golongan masyarakat. Dengan demikian terjadi pergeseran dari peranan yang bersifat elitis ke peranan yang meluas dan populis.

Fungsi dari Partai Politik yang sangat penting dan jarang dilaksanakan oleh Partai Politik antara lain adalah:³⁴

1. Partai Politik sebagai sarana komunikasi politik.

Salah satu tugas dari Partai Politik adalah menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang.

³⁴ Miriam Budiarjo, *op.cit.*, hlm. 163-164.

2. Partai Politik sebagai sarana sosialisasi politik.

Dalam usaha menguasai pemerintahan melalui kemenangan dalam pemilihan umum, partai harus memperoleh dukungan seluas mungkin. Untuk itu partai berusaha menciptakan *image* bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum. Disamping menanamkan solidaritas dengan partai, Partai Politik juga mendidik anggota-anggotanya menjadi manusia yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga negara dan menempatkan kepentingan sendiri di bawah kepentingan nasional

3. Partai Politik sebagai sarana rekrutmen politik.

Partai Politik juga berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai, dengan demikian partai turut memperluas partisipasi politik.

4. Partai Politik sebagai sarana pengatur konflik.

Dalam suasana demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat merupakan persoalan yang wajar, jika sampai terjadi konflik, Partai Politik harus berusaha untuk mengatasinya.

Mengenai fungsi Partai Politik juga diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yaitu sebagai sarana:

1. Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Republik Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Penciptaan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk mensejahterakan masyarakat.

3. Penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
4. Partisipasi politik warga negara.
5. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Dari berbagai fungsi tersebut, Partai Politik mempunyai kewajiban yang sangat penting, yaitu melaksanakan fungsi pendidikan politik terhadap anggotanya dan masyarakat luas. Partai Politik wajib mendidik anggota-anggotanya menjadi manusia yang sadar akan tanggung-jawab sebagai warga negara dan menempatkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan nasional. Hanya dengan pendidikan politik dapat diciptakan masyarakat yang cerdas dan sadar politik.

F. Pengertian Pendidikan Politik

Pendidikan politik pada hakekatnya adalah sebagai bagian dari pendidikan orang dewasa, karena hal ini menyangkut relasi antara individu atau individu dengan masyarakat di tengah kehidupan sosial dalam situasi konflik yang ditimbulkan oleh bermacam-macam perbedaan dan kemajemukan masyarakat. “Oleh karena itu pendidikan semacam ini tidak menonjolkan proses kutivasi individu menjadi “intelektual politik” yang bersinggasana

dalam menara gading keilmuan atau menjadi pribadi kritis yang cerdas terisolasi dari masyarakat lingkungan”.³⁵

Pengertian lain dari pendidikan politik adalah penyadaran warga negara untuk sampai pada pemahaman politik atau aspek-aspek politik dari setiap permasalahan sehingga dapat mempengaruhi dan ikut mengambil keputusan di tengah medan politik dan pertarungan konflik. “Pendidikan politik ini diselenggarakan sebagai upaya edukatif yang sistematis dan intensif untuk memantapkan kesadaran politik dan kesadaran beragama”.³⁶

Tidak jauh berbeda dengan pengertian di atas, Kartini Kartono memberikan pengertian pendidikan politik sebagai “upaya edukatif yang intensional, disengaja dan sistematis untuk membentuk individu sadar politik dan mampu menjadi pelaku politik yang bertanggung-jawab secara etis/moral dalam mencapai tujuan politik”.³⁷ Pendidikan politik ini adalah dalam bentuk pendidikan orang dewasa dengan menyiapkan kader-kader untuk pertarungan politik dan mendapatkan penyelesaian politik agar menang dalam pertarungan politik.

Unsur pendidikan dalam pendidikan politik ini pada hakekatnya merupakan aktivitas pendidikan dan mendidik diri seseorang tersebut, sehingga orang yang bersangkutan lebih mampu memahami dirinya sendiri, situasi kondisi lingkungan sekitarnya, kemudian mampu menilai segala

³⁵ Kartini Kartono, *Pendidikan Politik Sebagai Bagian Dari Pendidikan Orang Dewasa*, Mandar Madju, Bandung, 1996, hlm. 63.

³⁶ Nur Khoiron, *Pendidikan Politik Bagi Warga Negara*, LKIS, Yogyakarta, 1999, hlm. 3.

³⁷ Kartini Kartono, *op.cit.*, hlm. 64.

sesuatu secara kritis, untuk selanjutnya menemukan sikap dan cara-cara penanganan permasalahan yang ada ditengah lingkungannya.

Unsur pendidikan dalam pendidikan politik dapat diartikan sebagai aktivitas perilaku atau proses yang menggunakan kekuasaan untuk menegakkan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang sudah berlaku di masyarakat. Aturan dan keputusan tadi ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah di tengah kehidupan sosial yang dipenuhi kemajemukan, perbedaan kontroversi dan konflik, oleh karena itu perlu ditegakkan tata tertibnya.

Gabriel Almond mengemukakan pendapatnya bahwa pendidikan politik (sosialisasi politik) adalah: “Proses pembentukan sikap-sikap dan pola tingkah laku politik dan juga merupakan sarana bagi suatu generasi untuk mewariskan patokan-patokan dan keyakinan-keyakinan politik kepada generasi sesudahnya”.³⁸

Berdasarkan pengertian tersebut, bahwa pendidikan politik merupakan cara bagi suatu masyarakat mewariskan, menghajatkan atau meneruskan pola-pola tingkah laku politik atau keyakinan-keyakinan politik kepada generasi berikutnya.

Menurut Greseeke pendidikan politik dapat dijabarkan sebagai berikut:³⁹

³⁸ Gabriel Almond, dalam Mochtar Massoed, *Pendidikan Politik Terhadap Masyarakat*, Makalah Seminar, UGM Pers, Yogyakarta, 1999, hlm. 29.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 32.

1. *Billdungswissen*, artinya mengetahui dan memahami gambaran manusia dan perkembangannya serta gambaran kebudayaan bangsa sendiri, berdasarkan satu visi kemanusiaan tertentu.
2. *Orientierungswissen*, artinya berorientasi pada pemahaman kemanusiaan yang bisa memberikan kebaikan, kebahagiaan, kemakmuran, keadilan, kesejahteraan kepada setiap warga negara dan umat manusia.
3. *Verhaltungswissen*, artinya menunjuk atau mengarahkan pada tingkah laku pemahaman hukum, norma, tata tertib dan semua peraturan yang sah untuk menuntun tingkah laku politik.
4. *Aktionswissen*, artinya mau berbuat atau beraksi, maupun bertingkah laku/berbuat politik secara cermat, tepat dan alamiah, didukung oleh prinsip kebenaran dan keadilan, didahului oleh refleksi obyektif dan wawasan kritis.

Meskipun penghayatan nilai-nilai politik ini dapat berlangsung secara alamiah, dalam kenyataannya akan berhasil guna dan berdaya guna jika dalam pertumbuhannya ditunjang suatu usaha sadar dan terencana melalui pendidikan politik formal maupun non-formal. Pendidikan politik dapat berkembang jika ada kebebasan di tengah masyarakat dan pendidikan politik dapat dibangun dalam satu struktur kemasyarakatan tertentu, misalnya dalam organisasi sosial, partai politik, serikat pekerja dan lain-lainnya.

Syarat utama pengadaan lembaga-lembaga pendidikan politik tersebut adalah adanya otonomi atau kemandirian, sebab jika unsur kemandirian dan pendidikan politik itu tidak ada, maka lembaga tersebut hanya dijadikan alat

untuk mendoktrinasikan ide-ide para penguasa untuk menggiring rakyat, menentralkan tanpa dapat menyelesaikan keresahan dan melumpuhkan aktivitas dan kreativitas rakyat. Oleh karena itu pendidikan politik harus berisikan ajaran untuk berani mendobrak banyaknya kepincangan dalam masyarakat yang menimbulkan kesengsaraan pada rakyat.

G. Tujuan Pendidikan Politik

Inti dari pendidikan politik adalah pemahaman politik atau pemahaman aspek-aspek politik dari setiap permasalahan. Pemahaman politik berarti pemahaman konflik-konflik yang terjadi di dalam masyarakat yang disebabkan oleh adanya kontroversi, perbedaan, aneka ragam pikiran dan tindakan atau perilaku manusia dalam masyarakat, selain itu juga disebabkan oleh adanya persamaan kepentingan dan tingkah laku, sehingga memunculkan persaingan, kompetisi dan konflik-konflik.

Pendidikan politik merupakan proses mempengaruhi individu agar yang bersangkutan memperoleh informasi lengkap, wawasan yang lebih jernih dan ketrampilan politik yang lebih tinggi, sehingga mampu bersikap kritis dan lebih tertarah hidupnya. Masyarakat diharapkan menjadi warga negara yang lebih cerdas dan tidak terapung-apung melayang tanpa bobot pengertian dan kesadaran, serta tanpa arah di tengah kancah politik. Selanjutnya diharapkan dari dirinya kesanggupan melakukan re-orientasi terhadap kondisi-kondisi pribadi dan kondisi obyektif sekitarnya dan lingkungannya dengan cara lain,

kemudian berani berbuat lain, menuju kepada peningkatan taraf hidupnya dan masyarakat.

Dapat dimengerti bahwa pendidikan politik tidak diharapkan identik dengan propaganda atau indoktrinasi, propaganda akan membuat orang menjadi terlena dan semakin dungu, dengan pendidikan indoktrinasi akan menjadikan orang kaku, sempit pandangan dan fanatik. Maksud diadakannya pendidikan politik itu untuk mempersiapkan kader-kader politik yang mampu berfungsi baik di tengah perjuangan politik dan untuk mendapatkan penyelesaian politik yang bisa memuaskan semua pihak sesuai dengan konsep-konsep politik yang sudah ditetapkan.

Secara umum tujuan dari pendidikan politik adalah untuk membentuk sikap yang mendukung sistem politik dan untuk menyadarkan individu akan peranannya sebagai partisipan dalam kehidupan politik. Kartini Kartono menjelaskan pendidikan politik sebagai berikut:⁴⁰

1. Membuat rakyat mampu memahami situasi sosial politik yang penuh konflik, berani bersikap tegas memberikan kritik membangun terhadap kondisi masyarakat yang tidak mampu dan aktivitasnya diarahkan kepada proses demokratisasi perorangan dan demokratisasi semua lembaga kemasyarakatan serta lembaga negara, sanggup memperjuangkan kepentingan dan ideologi tertentu khususnya yang berkolerasi dengan keamanan dan kesejahteraan hidup bersama.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 68-69.

2. Mempertahankan dan mengupayakan peranan insani dari setiap individu sebagai warga negara, mengembangkan semua bakat dan kemampuan agar orang bisa aktif berpartisipasi dalam proses politik demi pembangunan diri, masyarakat sekitar bangsa dan negara.

Tujuan akhir dari pendidikan politik adalah diharapkan dengan pendidikan politik dapat meningkatkan taraf hidup rakyat ke arah yang lebih sejahtera, aman dan damai, kelestarian dan kejayaan tanah air sesuai dengan yang dicita-citakan bersama dan pada hakekatnya untuk mewujudkan kesejahteraan umum atau kesejahteraan rakyat harus diawali dengan mencerdaskan kehidupan bangsa.

H. Hal-hal Yang Berkaitan Dengan Pendidikan Politik

Pendidikan politik berlangsung seumur hidup dan pendidikan politik dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pendidikan politik berlangsung seumur hidup menunjukkan bahwa setiap individu, baik menyadari atau tidak menyadari, terkena proses pendidikan politik dari lahir hingga dewasa sampai meninggal dunia. Pendidikan secara langsung adalah bahwa materi pendidikan politik merupakan hal-hal yang berkaitan langsung dengan politik. Pendidikan politik tidak secara langsung adalah bahwa materi yang diberikan merupakan hal-hal yang tidak berkaitan dengan politik, akan tetapi materi tersebut memberikan dampak kepada individu yang terkena pendidikan politik kelak dikemudian hari dalam kehidupan politiknya.

Di dalam proses pendidikan politik atau sosialisasi politik tersangkut beberapa hal yang harus dipenuhi. Hal tersebut adalah, bahwa dalam proses pendidikan politik harus ada siapa yang menyampaikan apa dan ditujukan kepada siapa dengan cara bagaimana, jadi dalam proses pendidikan politik harus terkandung beberapa hal, yaitu:

1. Sarana Untuk Menyampaikan Pendidikan Politik.

Pendidikan politik dapat dilaksanakan dengan berbagai sarana, sehubungan dengan hal tersebut, Gabriel Almond menyatakan bahwa pendidikan politik dapat dilaksanakan melalui berbagai sarana, yaitu:⁴¹

- a. Keluarga, merupakan sarana yang pertama kali paling awal dijumpai oleh individu. Adanya keluarga, individu menjalin hubungan yang pertama kali dan dari keluarga individu memperoleh pelajaran tentang hidup dan kehidupan.
- b. Sekolah, sebagai sarana pendidikan politik yang memberikan pengetahuan politik dan peranan apa saja yang dapat dilakukan oleh generasi muda dipentas politik. Sekolah memberikan pandangan yang lebih konkrit tentang lembaga-lembaga politik dan peranan yang dilakukannya.
- c. Kelompok pergaulan, di dalam kelompok pergaulan ini setiap anggota diharapkan dapat menyesuaikan dirinya dengan pendapat kelompok, jadi dengan demikian kelompok pergaulan mensosialisasikan para anggotanya dengan jalan mendorong atau mendesak mereka untuk

⁴¹ *Ibid*, hlm. 70-71.

menyesuaikan diri dengan sikap-sikap atau tingkah laku yang dianut kelompoknya.

- d. Lingkungan pekerjaan, keterikatan individu dengan pekerjaan dan lingkungannya paling tidak memberi pengaruh walaupun tidak secara langsung, pada orientasi, sikap atau nilai politik individu yang bersangkutan.
- e. Media massa, mempunyai fungsi sebagai penyampai informasi, baik informasi politik maupun informasi yang lainnya kepada masyarakat. Media massa memegang peranan yang penting dalam menularkan sikap-sikap dan sifat-sifat kepada masyarakat. Di samping memberikan informasi tentang peristiwa politik, media massa menyampaikan secara langsung atau tidak langsung nilai-nilai utama yang dianut masyarakat.
- f. Kontak-kontak politik langsung, partai politik, kampanye politik, pemilihan umum, krisis politik dan daya tangkap lembaga-lembaga pemerintah terhadap tuntutan-tuntutan individu dari kelompok dapat mempengaruhi kesetiaan dan kesediaan untuk mematuhi hukum.
- g. Partai politik, pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik biasanya ditujukan kepada kader-kader yang meliputi dasar, tujuan, program partai yang bersangkutan. Pendidikan politik yang diberikan partai politik kadang-kadang penuh subyektivitas partai sehingga dapat menimbulkan fanatisme partai yang berlebihan.

Besar atau tidaknya peranan sarana pendidikan politik tergantung kepada:⁴²

- a. Tingkat interaksi antara individu dengan sarana yang ada.
 - b. Proses komunikasi yang berlangsung antara individu dan sarana tadi.
 - c. Derajat penekanan individu yang mengalami proses pendidikan politik.
 - d. Umur dari individu yang bersangkutan.
2. Materi Pendidikan Politik

Materi mengenai pendidikan politik dapat diklasifikasikan menjadi tiga yaitu, pengetahuan mengenai peraturan dan keyakinan-keyakinan politik tertentu, sikap-sikap yang dipelajari melalui kegiatan-kegiatan politik dan materi yang diberikan adalah merupakan orientasi yang ditujukan kepada otoritas atau penguasa yang ada.

Beberapa materi yang dapat diberikan dalam pelaksanaan pendidikan politik antara lain adalah:⁴³

- a. Nilai perjuangan bangsa, patriotisme, kesediaan berkorban dan sikap tidak mudah menyerah.
- b. Kehidupan dan kerukunan hidup beragama.
- c. Pengamalan kesamaan hak dan kewajiban, keadilan sosial, penghormatan terhadap hak asasi manusia.
- d. Demokarsi dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
- e. Kewarganegaraan.

⁴² *Ibid*, hlm. 79.

⁴³ *Ibid*, hlm. 90.

- f. Masalah ideologi negara.
- g. Disiplin sosial dan nasional.

3. Individu Yang Terkena Pendidikan Politik

Rakyat tidak boleh diremehkan atau dipandang rendah dan juga tidak boleh dijadikan obyek pendidikan. Betapapun terbelakangnya kondisi rakyat, mereka adalah warga negara yang terhormat dan bermartabat yang patut dihargai keberadaannya. Rakyat merupakan sumber daya insani potensial yang perlu dikembangkan dan diaktualkan, rakyat juga perlu mendapatkan pendidikan politik yang wajar-wajar supaya mampu berpartisipasi dalam bidang politik.

4. Metode Pendidikan Politik

Metode pendidikan politik yang ditekankan untuk menunjang sasaran keberhasilan pendidikan politik dapat dilakukan dengan metode formal, informal ataupun non-formal. Metode pendidikan formal biasanya digolongkan ke dalam tiga tingkatan pendidikan yaitu, primer, sekunder dan tersier dimana pemerintah bertindak sebagai penanggung-jawab.

Metode pendidikan informal adalah metode pendidikan yang tidak terorganisasi dan biasanya juga tidak sistematis, sedangkan pendidikan non-formal adalah segala bentuk penyelenggaraan kegiatan pendidikan yang sistematis dan diselenggarakan di luar sistem formal untuk memberikan pola-pola pembelajaran kepada anggota-anggota kelompok dalam suatu masyarakat baik dari kalangan orang dewasa maupun anak-anak.

I. Pendidikan Politik di Indonesia

Ketika orde baru runtuh banyak kalangan optimis bahwa demokrasi di Indonesia akan segera muncul dengan sehat. Penyebabnya adalah pada masa orde baru tersebut pembatasan terhadap kemerdekaan warga negara berjalan sangat ketat atau bisa dikatakan tidak demokratis. Pada jaman orde baru meskipun ada lembaga-lembaga politik, ada prosedur-prosedur demokrasi, namun demokrasi yang sesungguhnya tidak terjadi. Banyak faktor yang menyebabkan mengapa demokratisasi berjalan sangat lamban di Indonesia, selain faktor Soeharto juga para kroni politiknya yaitu Golkar dan Militer.

Keoptimisan banyak kalangan ternyata tidak terwujud, saat itu justru muncul banyak persoalan, antara lain masalah ekonomi, sosial dan politik yang belum diketahui secara jelas bagaimana mencari jalan keluar untuk menyelesaikannya. Di dalam persoalan politik khususnya, proses demokrasi terancam batal dan disintregasi bangsa mulai membayangi.

Membangun demokrasi paska runtuhnya Soeharto adalah berat, bahkan bisa lebih berat daripada meruntuhkan rezim Soeharto. Hal tersebut dapat terjadi karena kurang terdidiknya mayoritas warga negara secara politik, sehingga warga negara menjadi cenderung pasif dan mudah dimobilisasi untuk kepentingan politik. Warga negara menjadi tidak dapat mempengaruhi secara signifikan proses-proses pengambilan keputusan yang berkaitan erat dengan kehidupan mereka.

Penyebab utama kurang terdidiknya warga negara secara politik pada saat itu, bisa diakibatkan karena rezim orde baru ingin melanggengkan

kekuasaannya dan membiarkan warga negara menjadi bodoh secara politik. Pada masa orde baru pendidikan politik awalnya menggunakan metode spontanitas, kemudian meningkat menjadi suatu proyek dan terprogram, seperti pembinaan politik dalam negeri, P4, pengembangan pers yang bebas dan bertanggung jawab dan sebagainya.

Hasil dari pendidikan politik yang dilaksanakan belum sesuai dengan tujuan pelaksanaannya. Pada hakekatnya keseluruhan metode pendidikan politik yang dikembangkan di Indonesia belum mampu menghasilkan masyarakat yang mempunyai kesadaran politik hingga mampu menggunakan hak politiknya. Pendidikan politik pada masa orde baru lebih ditujukan kepada anak-anak, remaja dan pemuda yang diperlakukan sebagai generasi penerus dan penerus sistem politik yang sudah ada. Pelaksanaan pendidikan politik ini telah dimonopoli oleh pemerintah, misalnya dengan P4.

Organisasi sosial politik yang secara universal berfungsi mendidik rakyat untuk berpolitik sekaligus merekrut warga negara ke dalam proses politik telah mengesampingkan sebagai pelaku pendidikan politik. Praktek politik lewat keterlibatan rakyat dalam politik praktis tidak diandalkan menjadi jalur pendidikan politik yang penting sekalipun organisasi politik melakukan pengkaderan namun lingkupnya amat terbatas.

Kecenderungan suatu masyarakat untuk memanfaatkan partisipasi atau mobilisasi sangat tergantung kepada pola sistem politik yang mengatur kehidupan masyarakat bersangkutan. Sistem politik yang berpola demokrasi dengan ciri terdistribusinya kekuasaan negara kepada kekuatan sosial politik

secara relatif berimbang di satu pihak, dan terdistribusinya kekuasaan pemerintah atau lembaga negara atau pemerintahan secara horizontal atau vertikal dalam komposisi yang memungkinkan serasinya integrasi dengan otonomi di lain pihak merupakan kondisi bagi pengembangan partisipasi.

Pendidikan politik bagi rakyat yang akan diselenggarakan paling tidak harus mencakup empat dimensi strategis, yaitu:⁴⁴

1. Dimensi Ideologis

Dimensi ideologis terpusat pada satu aspek yang sangat mendasar, yaitu pencabutan Pancasila sebagai asas tunggal bagi partai politik.

2. Dimensi Struktural

Mengacu pada penyertaan rakyat dalam lembaga-lembaga resmi, pembetulan lembaga independen sebagai penyelenggara pemilu, pemberdayaan lembaga perwakilan rakyat, penguatan lembaga MPR.

3. Dimensi Prosedural

Meliputi penetapan proses, prosedur dan tata cara kehidupan politik yang lebih menjamin tegaknya keadilan rakyat, misalnya rakyat aktif mendaftarkan diri untuk dapat menjadi pemilih dalam pemilu, pembuatan RUU dari bawah yang diawali dari sub-komisi parlemen, rakyat wajib memberikan keterangan jika diminta oleh parlemen.

4. Dimensi Behavioral

Tercermin dari pengaturan tingkah laku politik warga negara yang membuka ruang bagi kebebasan, kompetisi, partisipasi dan kedamaian

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 95-96.

dalam menunaikan hak-hak politik serta menjalani kegiatan politik sehari-hari.

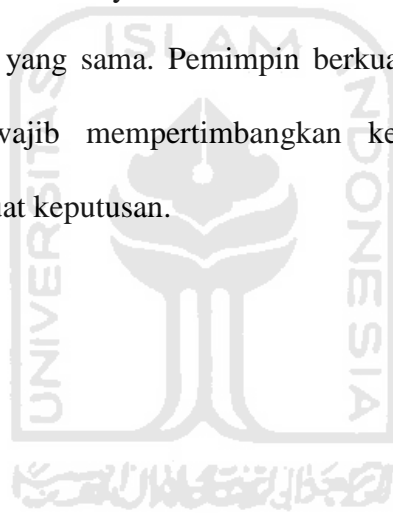
Pendidikan politik ini harus diusahakan secara sadar dan berencana, bersumber dari aspirasi yang digali dari kepribadian bangsa Indonesia dan yang telah disepakati secara nasional. Ciri karakteristik kepribadian Indonesia yang diharapkan bisa dibina lewat pendidikan politik antara lain adalah:⁴⁵

1. Sadar akan hak, kewajiban, tanggung-jawab moral dan politik terhadap kepentingan bangsa dan negara, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dan memberikan keteladanan yang baik.
2. Dengan sadar mentaati hukum dan Undang-undang Dasar 1945, memiliki disiplin pribadi, disiplin sosial dan nasional, nasionalisme yang teguh dan tidak sempit.
3. Berpandangan yang jauh ke depan, dengan tekad perjuangan mencari taraf kehidupan bangsa yang lebih tinggi, berkeadilan dan berkesejahteraan, didasarkan pada kemampuan objektif dan kekuatan kolektif bangsa Indonesia sendiri.
4. Aktif berpartisipasi dan kreatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya dalam kegiatan pembangunan nasional dan pembangunan politik.
5. Secara berkesinambungan menggalang persatuan dan kesatuan bangsa dengan kesadaran adanya keanekaragaman suku bangsa dan agama serta mendukung sistem kehidupan nasional yang demokratis.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 101.

6. Sadar akan perlunya pemeliharaan lingkungan hidup manusia dan lingkungan alam sekitarnya agar lestari, selaras dan seimbang sebagai wadah kehidupan yang sehat.

Selain berdasarkan pada kepribadian bangsa Indonesia, pendidikan politik juga bersumber pada budaya politik yang berasal dari kehidupan modern dan bersifat universal. Budaya politik yang berasal dari kehidupan modern dan bersifat universal berdasarkan prinsip-prinsip kebebasan, persamaan dan keterwakilan politik. Di sini masyarakat diakui keberadaannya, dimana setiap individu mempunyai hak yang sama. Pemimpin berkuasa atas kehendak rakyat karena itu pemimpin wajib mempertimbangkan kepentingan rakyat yang diwakilinya dalam membuat keputusan.



BAB III

PERANAN PARTAI DEMOKRAT DALAM PENDIDIKAN POLITIK DI DAERAH PEMILIHAN IV KABUPATEN TEMANGGUNG

A. Daerah Pemilihan IV Kabupaten Temanggung

Daerah Pemilihan IV meliputi Kecamatan Kaloran, Kranggan dan Pringsurat. Ketiga kecamatan tersebut berada disebelah tenggara Kabupaten Temanggung. Kecamatan Kaloran berbatasan dengan Kabupaten Semarang dan Kecamatan Kranggan berbatasan dengan Kabupaten Magelang. Kecamatan Kaloran dalam pembagian wilayah administrasi terbagi menjadi 14 desa/kelurahan, Kecamatan Kranggan 13 desa/kelurahan dan Kecamatan Pringsurat 14 desa/kelurahan.

Berdasarkan Registrasi tahun 2010 Kecamatan Kaloran berpenduduk 42.394 jiwa. Penduduk berusia 5 tahun keatas yang menamatkan perguruan tinggi hanya 369 jiwa, tamat Akademi / sarjana muda sebesar 179 jiwa, tamat SLTA sederajat sebesar 2.589 jiwa, tamat SLTP sederajat 5.502 jiwa, tamat SD sederajat sebesar 18.285 jiwa, tidak / belum tamat SD sebesar 12.534 jiwa. Jumlah penduduk menurut mata pencaharian masih didominasi oleh sektor pertanian yaitu 18.328 jiwa.⁴⁶

Berdasarkan Registrasi tahun 2008 Kecamatan Kranggan berpenduduk 42.434 jiwa. Jumlah penduduk berusia 5 tahun keatas yang menamatkan

⁴⁶ <http://www.temanggungkab.go.id/profil.php?mnid=32/>, 5 Desember 2011, 21.00

perguruan tinggi hanya 1.009 jiwa, tamat Akademi / sarjana muda sebesar 377 jiwa, tamat SLTA sederajat sebesar 4.313 jiwa, tamat SLTP sederajat 6.755 jiwa, tamat SD sederajat sebesar 15.252 jiwa, tidak / belum tamat SD sebesar 11.071 jiwa. Jumlah penduduk menurut mata pencaharian masih didominasi oleh sektor pertanian yaitu 14.995 jiwa.⁴⁷

Berdasarkan Registrasi tahun 2008 Kecamatan Pringsurat berpenduduk 45.253 jiwa. Jumlah penduduk berusia 5 tahun keatas yang menamatkan perguruan tinggi hanya 616 jiwa, tamat Akademi / sarjana muda sebesar 200 jiwa, tamat SLTA sederajat sebesar 3.625 jiwa, tamat SLTP sederajat 6.377 jiwa, tamat SD sederajat sebesar 21.289 jiwa, tidak / belum tamat SD sebesar 9.239 jiwa. Jumlah penduduk menurut mata pencaharian masih didominasi oleh sektor pertanian yaitu 17.401 jiwa.⁴⁸

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa ketiga kecamatan yang berada pada Daerah Pemilihan IV Kabupaten Temanggung tersebut memiliki jenis karakter yang hampir sama. Kesamaan tersebut dapat kita lihat dari segi geografi, demografi, pendidikan, dan kehidupan masyarakatnya.

B. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Temanggung

DPC Partai Demokrat Kabupaten Temanggung terletak di Jalan Kyai Bakung No. 17 RT 01 RW 5 Bakungan, Tlogorejo, Temanggung. Ketua dan Sekretaris DPC Partai Demokrat saat ini dijabat oleh Bapak Sujarwo dan Bapak

⁴⁷ <http://www.temanggungkab.go.id/profil.php?mnid=36/>, 5 Desember 2011, 21.00.

⁴⁸ <http://www.temanggungkab.go.id/profil.php?mnid=39/>, 5 Desember 2011, 21.00.

Adi Setyaka. DPC Partai Demokrat Kabupaten Temanggung terdiri dari 6 Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) yang berada diseluruh kecamatan di Kabupaten Temanggung. DPAC Partai Demokrat dapil I meliputi Kecamatan Temanggung, Tembarak, Tlogomulyo, dan Selopampang. DPAC Partai Demokrat dapil II meliputi Kecamatan Kecamatan Bulu, Parakan, Kledung, dan Bansar. DPAC Partai Demokrat dapil III meliputi Kecamatan Kedu dan Kandangan. DPAC Partai Demokrat dapil IV meliputi Kecamatan Kaloran, Kranggan, dan Pringsurat. DPAC Partai Demokrat dapil V meliputi Kecamatan Gemawang, Jumo, dan Ngadirejo. DPAC Partai Demokrat dapil VI meliputi Kecamatan Candirotto, Wonobojo, Bejen, dan Tretep.

DPC Partai Demokrat Kabupaten Temanggung mempunyai berbagai kewajiban, yaitu melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan kongres, keputusan rapat tingkat nasional, keputusan musyawarah daerah, keputusan rapat tingkat daerah, keputusan musyawarah cabang, keputusan rapat tingkat cabang, dan peraturan partai lainnya; memberikan perintah, persetujuan, arahan, dan pedoman tentang kegiatan Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat kabupaten/ kota; memberikan perintah, persetujuan, arahan, dan pedoman kepada dewan pimpinan partai di semua tingkatan di bawahnya dalam melaksanakan keputusan-keputusan dan Garis-Garis Besar Strategi, Kebijakan, dan Rencana Aksi serta ketentuan partai; menyampaikan laporan berkala kepada kepada Dewan Pimpinan Pusat dan

Dewan Pimpinan Daerah; memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Cabang.⁴⁹

Untuk kelancaran kegiatan partai di tingkat cabang maka DPC Partai Demokrat mempunyai hak untuk membuat berbagai peraturan pelaksana dalam rangka pelaksanaan keputusan musyawarah cabang. Selain hal tersebut, DPC juga berhak memberhentikan fungsionaris DPC melalui rapat pleno DPC dan dilaporkan dalam Rapat Pimpinan Cabang, menerima atau menolak ketetapan rapat pleno Dewan Pimpinan Ranting dan Rapat Pimpinan Anak Ranting tentang pemberhentian fungsionaris Dewan Pimpinan Ranting dan Pimpinan Anak Ranting, membatalkan keputusan Dewan Pimpinan Ranting dan Pimpinan Anak Ranting atau Musyawarah Ranting dan Rapat Pimpinan Anak Ranting melalui Rapat Pleno Cabang apabila keputusan tersebut bertentangan dengan keputusan dan kebijakan partai atau membahayakan partai, bertindak mewakili partai di tingkat cabang dan mengadakan hubungan kerjasama serta persahabatan dengan organisasi lain di tingkat cabang.

1. Kewajiban Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Temanggung:⁵⁰

- a. Mengusahakan terlaksananya tujuan dan usaha-usaha partai di daerah yang bersangkutan.
- b. Menjalankan keputusan-keputusan dan garis-garis kebijakan partai atau instruksi-instruksi yang diberikan oleh Dewan

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Adi Setyaka, Sekretaris Partai Demokrat Kabupaten Temanggung, di Temanggung (2 Desember 2011).

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Adi Setyaka, Sekretaris Partai Demokrat Kabupaten Temanggung, di Temanggung (2 Desember 2011).

Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah dan keputusan musyawarah cabang.

- c. Memberikan petunjuk-petunjuk kepada Anak Cabang Partai di tingkat kecamatan dan Pimpinan Ranting di tingkat Kecamatan dan Pimpinan Ranting di tingkat kelurahan/desa di daerah yang bersangkutan dalam melaksanakan keputusan dan garis-garis kebijaksanaan partai serta ketentuan-ketentuan partai.
 - d. Memberikan arahan atas kegiatan-kegiatan Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
 - e. Menyampaikan laporan kepada Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Daerah mengenai perkembangan partai, fakta-fakta, perkembangan politik dan lain-lain di daerahnya.
2. Hak Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Temanggung:⁵¹
- a. Membuat peraturan-peraturan untuk kelancaran usaha-usaha partai di daerahnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dan atau peraturan-peraturan yang lebih tinggi.
 - b. Mengesahkan susunan Dewan Pimpinan Anak Cabang.
 - c. Mewakili partai dalam tindakan keluar sejauh yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan daerah cabangnya sesuai petunjuk dari Dewan Pimpinan Daerah masing-masing.

⁵¹ Hasil wawancara dengan Adi Setyaka, Sekretaris Partai Demokrat Kabupaten Temanggung, di Temanggung (2 Desember 2011).

3. Visi, Misi dan Tujuan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Temanggung

Visi Partai Demokrat

Partai Demokrat bersama masyarakat luas berperan mewujudkan keinginan luhur rakyat Indonesia agar mencapai pencerahan dalam kehidupan berbangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur, menjunjung tinggi semangat nasionalisme, humanisme, dan internasionalisme, atas dasar ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam tatanan dunia baru yang damai, demokratis dan sejahtera.

Misi Partai Demokrat:

- a. Memberikan garis yang jelas agar partai berfungsi secara optimal dengan peranan yang signifikan di dalam seluruh proses pembangunan Indonesia baru yang dijiwai oleh semangat reformasi serta pembaharuan dalam semua bidang kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan kedalam formasi semula sebagaimana telah diikrarkan oleh para pejuang, pendiri pencetus proklamasi kemerdekaan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan titik berat kepada upaya mewujudkan perdamaian, demokrasi (Kedaulatan rakyat) dan kesejahteraan.
- b. Meneruskan perjuangan bangsa dengan semangat kebangsaan baru dalam melanjutkan dan merevisi strategi pembangunan Nasional

sebagai tumpuan sejarah bahwa kehadiran partai Demokrat adalah melanjutkan perjuangan generasi-generasi sebelumnya yang telah aktif sepanjang sejarah perjuangan bangsa Indonesia, sejak melawan penjajah merebut Kemerdekaan, merumuskan Pancasila dan UUD 1945, mengisi kemerdekaan secara berkesinambungan hingga memasuki era reformasi.

- c. Memperjuangkan tegaknya persamaan hak dan kewajiban Warganegara tanpa membedakan ras, agama, suku dan golongan dalam rangka menciptakan masyarakat sipil (civil society) yang kuat, otonomi daerah yang luas serta terwujudnya representasi kedaulatan rakyat pada struktur lembaga perwakilan dan permusyawaratan.

Tujuan Partai Demokrat:

- a. Menegakkan, mempertahankan dan mengamankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai jiwa proklamasi kemerdekaan.
- b. Mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, sebagai mana diwujudkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
- c. Melakukan segala usaha dan ikhtiar untuk membangun masyarakat Indonesia baru yang berwawasan nasionalisme, pluralism, dan humanism.
- d. Meningkatkan partisipasi seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan kehidupan bernegara yang memiliki pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, serta dinamis menuju terwujudnya Indonesia yang

demokratis, sejahtera, maju, modern dalam suasana aman dan penuh kedamaian lahir dan batin.

C. Peranan Partai Demokrat dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik di Daerah Pemilihan IV Kabupaten Temanggung

Pelaksanaan pendidikan politik oleh Partai Demokrat kepada masyarakat menurut keterangan yang didapat dari hasil penelitian dapat dibagi menjadi dua, yaitu:⁵²

1. Program pendidikan untuk menumbuhkan kesadaran demokrasi, pemilihan umum, dan hak-hak politik rakyat.
2. Pemberian informasi yang berhubungan dengan masalah-masalah teknis, yakni program pendidikan pemilih untuk memberikan pengetahuan mengenai tatacara serta berbagai tahapan proses pemilihan umum.

Lebih lanjut, ada dua hal mengenai pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat, bangsa, dan negara, yaitu:⁵³

1. Masyarakat mengetahui hak, kewajiban, fungsi negara, dan tata pemerintahan sebagai implikasi diselenggarakannya pemilu. Kesadaran politik yang dihasilkan dalam setiap pemilu tentu akan sangat berguna bagi pembentukan kultur dan etika demokrasi secara sehat.

⁵² Hasil wawancara dengan Adi Setyaka, Sekretaris Partai Demokrat Kabupaten Temanggung, di Temanggung (12 Desember 2011).

⁵³ Hasil wawancara dengan Adi Setyaka, Sekretaris Partai Demokrat Kabupaten Temanggung, di Temanggung (12 Desember 2011).

2. Pentingnya unsur pendidikan politik dalam pemilihan umum adalah untuk mendorong sebuah tata pemerintahan yang baik. Dengan tingkat kesadaran politik yang memadai, maka kekuasaan yang dipegang oleh partai pemenang pemilu tidak akan digunakan menurut kepentingannya sendiri. Kesadaran politik akan membawa kesadaran bahwa kekuasaan berasal dari rakyat dan tentu akan digunakan demi kemaslahatan.

Dalam memainkan peranannya berkaitan dengan pendidikan politik terhadap masyarakat, Partai Demokrat selalu berusaha untuk tidak mementingkan kelompoknya sendiri dan tidak berusaha memobilisasi rakyat hanya untuk meraih kekuasaan. Partai Demokrat tetap memperhatikan kedaulatan dan aspirasi rakyat. Peran Partai Demokrat dalam pendidikan politik terhadap masyarakat dilakukan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang madani, yaitu masyarakat yang mampu berkreasi secara maksimal dan menyerap makna dari demokrasi secara konstruktif, sehingga dari waktu ke waktu dapat memiliki suatu sistem politik yang makin demokratis.

Bentuk pendidikan politik yang sesuai dengan tuntutan undang-undang tentang politik dan dinamika rakyat harus dibangun dengan berlandaskan kepada demokrasi Indonesia, yaitu demokrasi dengan nilai-nilai normatif yang berlaku di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peranan Partai Demokrat dalam pendidikan politik terhadap masyarakat wajib dilaksanakan agar tercipta masyarakat yang cerdas dan sadar politik, yaitu masyarakat yang mengetahui hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya sebagai warga negara, kemudian masyarakat menjadi

lebih aktif dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Landasan politik yang digunakan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pendidikan politik adalah landasan yang pada prinsipnya mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia yaitu landasan ideologi Pancasila dan landasan konstitusional Undang-undang Dasar 1945.

Pendidikan politik kepada masyarakat merupakan usaha yang harus dilakukan agar proses demokratisasi dapat terwujud dan berjalan dengan baik. Begitu pentingnya pendidikan politik, sehingga pendidikan politik mendapat perhatian yang besar dari Partai Demokrat di Kabupaten Temanggung dalam pemilu 2009. Berhubung perannya dalam pendidikan politik terhadap masyarakat, maka secara umum Partai Demokrat menyatakan bahwa:⁵⁴

1. Berusaha mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, memiliki jati diri, cerdas, berakhlak mulia, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam kehidupan politik.
2. Berusaha meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia agar dapat mengembangkan hak dan kewajibannya secara bebas.
3. Memperjuangkan pers yang bebas, sehingga hak masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan politik, ekonomi, social, dan budaya terjamin.

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Adi Setyaka, Sekretaris Partai Demokrat Kabupaten Temanggung, di Temanggung (12 Desember 2011).

Keberhasilan pelaksanaan manajemen partai politik terutama dalam mencapai visi dan misi serta tujuan dan sasaran organisasi banyak dipengaruhi oleh efektivitas koordinasi pada tingkat DPP, DPD, dan DPC. Di samping itu, kemampuan, loyalitas, keuletan, moralitas, dan militansi seorang kader sangat diperlukan bahkan menjadi syarat utama untuk menjadi pimpinan/pengurus partai. Pembinaan kader partai tidak hanya dipersiapkan dalam kepemimpinan partai politik, tetapi termasuk juga dalam kepemimpinan dalam masyarakat dan pemerintahan.

Program pengembangan partai untuk tumbuh kuat membuat Partai Demokrat menyadari bahwa partai tidak sekedar sebagai wadah perpolitikan saja, tetapi harus berperan sebagai organisasi masyarakat yang peduli pada kehidupan rakyat kecil. Mereka itu yang harus diangkat harkat dan martabatnya sebagai manusia sesuai kodrat alam.

Salah satu fungsi partai politik adalah melakukan pendidikan politik. Fungsi pendidikan politik parpol itu sendiri belum menunjukkan hasil yang signifikan bagi peningkatan kesadaran politik masyarakat. Partai politik bahkan menuai kritik karena cenderung mengutamakan kepentingan kekuasaan atau kepentingan para elit parpol ketimbang kepentingan untuk memajukan masyarakat, bangsa, dan negara. Ironisnya, pendidikan politik yang sering dikumandang para elit parpol hanya sebuah slogan tidak bermakna. Kondisi ini menuntut setiap partai politik untuk mengoreksi

sejauhmana orientasi dan implementasi visi dan misi parpol secara konsisten dan terus-menerus.⁵⁵

Fungsi pendidikan politik parpol saat ini sangat buruk. Kualitas implementasi peran dan fungsi parpol seharusnya dimulai dari proses rekrutmen dan kaderisasi pengurus parpol. Proses rekrutmen dan kaderisasi parpol harus dijalankan secara baik, sehingga pengurus parpol bertanggung jawab menjalankan fungsi-fungsi parpol diantaranya fungsi pendidikan politik.

Pimpinan partai politik seharusnya mulai melakukan perbaikan-perbaikan terutama dalam melakukan proses rekrutmen dan kaderisasi di tingkat parpol. Pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik dalam revisi UU tentang Partai Politik juga harus lebih diperhatikan, agar implementasi fungsi pendidikan parpol dapat dijalankan secara terukur dan bertanggung jawab.

Pengaturan implementasi fungsi partai politik dalam UU tentang Partai Politik tidak harus diatur secara detail. Pendidikan politik menjadi kewajiban parpol yang diatur dalam kebijakan masing-masing parpol. Pengaturan implementasi fungsi dan peran parpol tidak boleh mengarah pada upaya deparpolisasi, karena akan menghambat proses demokrasi. Peningkatan peran dan fungsi parpol menunjukkan adanya dukungan dari publik termasuk pemerintah misalnya dukungan dari aspek pendanaan.

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Adi Setyaka, Sekretaris Partai Demokrat Kabupaten Temanggung, di Temanggung (12 Desember 2011).

D. Usaha-Usaha Yang Telah Dilakukan Oleh DPC Partai Demokrat di Daerah Pemilihan IV Kabupaten Temanggung Dalam Rangka Pelaksanaan Pendidikan Politik

Begitu pentingnya pendidikan politik, sehingga Partai Demokrat memasukkan pendidikan politik ke dalam program partai yang disusun oleh komisi program kerja. Dimasukkannya program pendidikan politik dalam program Partai Demokrat merupakan salah satu wujud usaha yang dilakukan Partai Demokrat untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

Program pendidikan politik secara nyata yang dilakukan oleh Partai Demokrat Kabupaten Temanggung adalah:⁵⁶

1. Safari seminar dan dialog politik secara berkala di tingkat Kecamatan khususnya Daerah Pemilihan IV Kabupaten Temanggung.

Kegiatan seminar dan dialog politik yang selama ini dilakukan oleh Partai Demokrat Kabupaten Temanggung dilaksanakan satu tahun menjelang Pemilu 2009 setiap bulan sekali. Seminar dan dialog politik yang dilakukan hanya terbatas pada Pengurus Anak Cabang (PAC) Partai Demokrat dan kader-kadernya, sehingga belum dapat dirasakan masyarakat kalangan bawah, terutama nonsimpatian.

2. Kaderisasi di setiap Kecamatan di Kabupaten Temanggung, termasuk Daerah Pemilihan IV Kabupaten Temanggung.

⁵⁶Hasil wawancara dengan Adi Setyaka, Sekretaris Partai Demokrat Kabupaten Temanggung, di Temanggung (13 Desember 2011).

Kegiatan kaderisasi ini dilaksanakan langsung oleh PAC yang merupakan bagian dari program DPC Partai Demokrat Kabupaten Temanggung. Kegiatan ini dilaksanakan di seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Temanggung dan waktu pelaksanaannya satu tahun menjelang Pemilu 2009 setiap bulan sekali di setiap Pengurus Anak Cabang atau tingkat Kecamatan.

3. Kegiatan sosialisasi pengenalan pendidikan politik dan pengurus partai yang dilakukan melalui berbagai pelayanan kesehatan.

Kegiatan sosialisasi ini dilakukan oleh PAC ataupun langsung oleh DPC Partai Demokrat Kabupaten Temanggung. Namun kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh PAC atau DPC Partai Demokrat Kabupaten Temanggung ini lebih tertuju untuk menggalang simpatisan. Kegiatan ini dilaksanakan hampir setiap bulan menjelang pelaksanaan pemilu. Pelayanan sosial berupa bantuan pembangunan sarana ibadah, donor darah, dan pemberian bantuan berupa alat tulis bagi siswa/pelajar yang kurang mampu menjadi bagian dari program sosial sosialisasi DPC Partai Demokrat Kabupaten Temanggung.

Pendidikan politik rakyat secara nyata dilaksanakan DPC Partai Demokrat Kabupaten Temanggung pada tanggal 22 Februari 2009, bertempat di Aula Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung. Kegiatan tersebut dibagi menjadi dua program.⁵⁷

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Adi Setyaka, Sekretaris Partai Demokrat Kabupaten Temanggung, di Temanggung (13 Desember 2011).

1. Program pendidikan untuk menumbuhkan kesadaran demokrasi, pemilihan umum, dan hak-hak politik rakyat. Materi programnya adalah pemahaman tentang hak rakyat untuk mendirikan sebuah parpol sesuai peraturan perundang-undangan dan hak rakyat untuk menyuarakan aspirasi secara langsung kepada wakil-wakilnya di legislatif.
2. Program berupa pemberian informasi yang berhubungan dengan masalah-masalah teknis pemilihan umum, diantaranya adalah tata cara dan tahapan dalam pemilihan umum.

Hingga saat ini pelaksanaan pendidikan politik masih saja diselimiti oleh kepentingan-kepentingan politik yang lebih berpihak pada kepentingan partai. Pemusatan perhatian terhadap kepentingan partai menyebabkan hilangnya esensi dasar dari sebuah pendidikan politik seperti yang telah diatur dalam undang-undang.

E. Hambatan DPC Partai Demokrat dalam Melaksanakan Pendidikan Politik di Daerah Pemilihan IV Kabupaten Temanggung

Usaha meningkatkan pengetahuan dan wawasan politik bagi masyarakat melalui pendidikan politik, dimana tujuan utamanya adalah menyadarkan masyarakat akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara tidak jarang menemui berbagai persoalan yang dipandang sebagai hambatan dalam pelaksanaan pendidikan politik.

Lebih rinci hambatan-hambatan dalam pendidikan politik masyarakat antara lain adalah:⁵⁸

1. Masih banyak pemimpin politik merasa terusik apabila rakyat memahami urusan politik dan pendidikan politik.
2. Sulitnya menyadarkan rakyat untuk bangkit dari kondisi diri sendiri yang diliputi banyak kesengsaraan dan kemiskinan, sebagai akibat terlalu lama hidup dalam penindasan.
3. Apatisme dan sinisme politik yang cenderung menjadi sikap putus asa menyebabkan rakyat sulit untuk mempercayai usaha-usaha edukatif dan gerakan-gerakan politik.
4. Latar belakang pendidikan yang masih rendah, sehingga masyarakat sulit untuk memahami situasi politik di sekitarnya.
5. Masih kurangnya peran dari lembaga-lembaga baik pemerintah, sosial politik, dan lembaga swadaya masyarakat terhadap proses pendidikan politik bagi masyarakat.
6. Kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berpengalaman.
7. Kurangnya fasilitas yang tersedia baik berupa kantor yang representatif maupun buku-buku mengenai politik.
8. Kurangnya anggaran dana yang tersedia untuk melaksanakan program pendidikan politik.

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Adi Setyaka, Sekretaris Partai Demokrat Kabupaten Temanggung, di Temanggung (13 Desember 2011).

9. Sikap pasif dan kurangnya partisipasi dari sebagian masyarakat terhadap setiap usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh partai politik karena merasa bukan simaptisan dari partai politik tersebut.

Sebesar apapun hambatan yang dihadapi saat ini, parpol tetap memiliki kewajiban untuk menciptakan masyarakat yang paham dan mengerti arti penting hak dan kewajiban politiknya. Dengan analisis yang baik, parpol seharusnya mampu menciptakan berbagai program pendidikan politik yang berkualitas, program pendidikan politik yang lebih mengutamakan kepentingan masyarakat.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari permasalahan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dimasukkannya program pendidikan politik dalam program DPC Partai Demokrat merupakan salah satu wujud usaha yang dilakukan Partai Demokrat untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat di Daerah Pemilihan IV Kabupaten Temanggung. Melalui kaderisasi, sosialisasi, pengenalan pendidikan politik dan pengurus partai, seminar serta dialog politik secara berkala Partai Demokrat berupaya melaksanakan tanggung jawabnya sesuai Undang-Undang No.2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
2. Usaha meningkatkan pengetahuan dan wawasan politik bagi masyarakat melalui pendidikan politik, dimana tujuan utamanya adalah menyadarkan masyarakat akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara tidak jarang menemui berbagai persoalan dipandang sebagai hambatan dalam pelaksanaan pendidikan politik. Munculnya persoalan yang dipandang sebagai hambatan tersebut menggambarkan belum berhasilnya Partai Demokrat dalam meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan sesuai landasan ideologi Pancasila, dan landasan konsitusional UUD 1945.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemimpin partai politik seharusnya mulai melakukan perbaikan-perbaikan dalam hal penyusunan program partai terutama dalam melakukan proses rekrutmen dan kaderisasi di tingkat partai politik.
2. Pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik dalam revisi UU tentang Partai Politik juga harus lebih diperhatikan, agar implementasi fungsi pendidikan parpol dapat dijalankan secara terukur dan bertanggung.

DAFTAR PUSTAKA

- Afan Gaffar, *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000.
- Harun Salim, Uzair Fauzan, Dinar Ibnu Sholeh, *Tujuh Mesin Pendulang Suara*, LKIS dan CH-PPS, Yogyakarta, 1999.
- M. Amien Rais, “Pengantar” dalam *Demokrasi dan Proses Politik, Kumpulan Karangan dari Majalah Prisma*, LP3ES, Jakarta, 1986.
- Marbun, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1983.
- Kartono, *Pendidikan Politik Sebagai Bagian Dari Pendidikan Orang Dewasa*, Mandar Madju, Bandung, 1996.
- Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, Hasta, Jakarta, 1990.
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1992.
- Riswandha Ismawan, *Penyaluran Aspirasi Politik Masyarakat*, UII, Yogyakarta, 1991.
- Toto Pandoyo, *Ulasan Terhadap Beberapa Ketentuan UUD 1945*, Liberty, Yogyakarta, 1981.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
- www.demokrat.or.id
- www.temanggungkab.go.id